

**ANALISIS PROPAGANDA KOMPUTASIONAL TIONGKOK TERHADAP
TAIWAN SEBAGAI UPAYA REUNIFIKASI TIONGKOK-TAIWAN
TAHUN 2016-2020**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

MUHAMMAD FADHIL HIDAYAT SAMSIR

18323039

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2023

**ANALISIS PROPAGANDA KOMPUTASIONAL TIONGKOK TERHADAP
TAIWAN SEBAGAI UPAYA REUNIFIKASI TIONGKOK-TAIWAN
TAHUN 2016-2020**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

MUHAMMAD FADHIL HIDAYAT SAMSIR

18323039

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN
ANALISIS PROPAGANDA KOMPUTASIONAL TIONGKOK
TERHADAP TAIWAN SEBAGAI UPAYA REUNIFIKASI
TIONGKOK-TAIWAN TAHUN 2016-2020

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



Karina

Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

- 1 Rizki Dian Nursita, S.IP., M.H.I.
- 2 Hadza Min Fadhli Robby, S.IP., M.Sc.
- 3 Mohamad Rezky Utama, S.IP., M.Si.

Tanda Tangan

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 23 Agustus 2023



Muhammad Fadhil Hidayat Samsir

HALAMAN PERSEMBAHAN



Penelitian ini saya persembahkan untuk :

Ayah saya, Samsir dan Ibu saya, Jumiati

Terima kasih atas semua bentuk doa, dedikasi, perjuangan, kesabaran dan perhatian yang selalu diberikan kepada saya selama saya hidup di dunia hingga titik pengerjaan skripsi ini. Terimakasih atas keringat dan air mata yang sudah tertetes untuk anak pertamamu ini

Adik-adik saya,

Muh. Rafli Dwi Anugrah Samsir , Syafira Nur Aulia , dan Aisyah Nur Fariza

Terima kasih atas semua bentuk dukungan dan motivasi mereka dengan cara menanyakan “*Sudah sampai mana skripsinya? kapan mau sidang? NIKAH TERUS, LULUS DULU !*” yang menjadi motivasi saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Semoga hal baik selalu menyertai kalian.

Rekan-rekan HI UII 2018 , 2019 , 2020

Terima kasih atas semua bentuk dukungan dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini

Rekan-rekan SutingYuk

Terima kasih telah memberikan ruang dan tempat untuk bisa berkembang, terutama menyelesaikan skripsi ini

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah subhanallahu wa ta ta'allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas segala nikmat, karunia, dan rahmat yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan baik. dalam proses pengerjaan skripsi, penulis menyadari bahwa besarnya bantuan, bimbingan, dan juga dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi ditengah jenuhnya situasi pandemic.
2. Ibu Rizky Dian Nursita, S.I.P., M.H.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih atas waktu, bimbingan, serta bantuan yang ibu berikan dalam proses penyelesaian tugas akhir ditengah kesibukan dan keseharian ibu. Semoga kebaikan ibu dibalas oleh Allah SWT.
3. Dosen-dosen Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia. Terima kasih atas ilmu yang diberikan, penjelasan yang disampaikan, dan juga bimbingan yang selalu dilakukan bapak ibu dosen sehingga mempermudah perjalanan mahasiswa dalam menuntut ilmu. Semoga pengorbanan bapak ibu dosen mendapatkan balasan dari Allah SWT.
4. Ibu dan bapak yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, dan juga memahami apa saja yang anaknya harapkan. Terima kasih karena selalu menjadi orang tua yang

paling saya banggakan. Tanpa dukungan kalian, perjalanan saya di masa kuliah dan menyelesaikan tugas akhir akan terasa lebih berat dan penuh rintangan.

5. Kepada adik-adik saya, Muhammad Rafli Dwi Anugrah Samsir, Shafira Nur Aulia, Aisyah Nur Fazira yang selalu mendukung saya setiap saat.

6. Kepada Alumni Romusha yang selalu nuntut cepat selesaiin, terutama Ilham yang selalu mendampingi, terimakasih banyak.

7. Kepada keluarga baru saya di Yogyakarta, *the glitch*, terimakasih atas dukungannya selama ini, dari pertengahan kuliah hingga kelulusan saya, terima kasih banyak.

7. Kepada mentor, senior, dan kakak kak Fahmy Arsyad Said yang selalu mendukung proses pembelajaran dan pengembangan serta bantuannya selama semester akhir di FAS Home dan SutingYuk, disertai kawan-kawan dan rekan baik saya, kak Okky Kumala Sari, Shinta Namas, Fadhil Rahmat, Laode Ainul, M.Luqman, terimakasih banyak.

8. Kepada sahabat saya, Mohammad Asyikin Nur, sudah mengingat, mendukung setiap langkah selama masa kuliah dan masa kerja, terimakasih banyak.

9. Kepada Aisyah Syifa yang telah hadir disaat-saat terakhir sebagai pendorong penyelesaian penelitian ini, terimakasih untuk saat ini dan kedepannya.

10. Kepada teman-teman, kenalan, dan setiap orang yang secara langsung ataupun tidak langsung telah menemani selama saya melaksanakan studi saya di Yogyakarta, saya ucapkan banyak terimakasih.

DAFTAR ISI

SKRIPSI	1
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Cakupan penelitian	7
1.5 Tinjauan Pustaka	8
1.6 Kerangka Pemikiran	11
1.7 Argumen Sementara	13
1.8 Metode Penelitian	14
1.8.1 Jenis Penelitian	14
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian	14
1.8.3 Metode Pengumpulan Data	14
1.8.4 Proses Penelitian	15
1.9 Sistematika Pembahasan	15
BAB 2 SEJARAH DAN DINAMIKA KONFLIK SERTA UPAYA REUNIFIKASI OLEH TIONGKOK TERHADAP TAIWAN	17
2.1. Sejarah dan Dinamika Konflik Tiongkok dan Taiwan serta Upaya Reunifikasinya	18
2.1.1 Sejarah Konflik antara Tiongkok dan Taiwan	18

2.1.2 Dinamika Upaya Reunifikasi oleh Tiongkok terhadap Taiwan	23
2.2 Tata Kelola Pemanfaatan Dunia Siber Tiongkok pada Konflik Tiongkok dan Taiwan	29
BAB 3 PROPAGANDA KOMPUTASIONAL OLEH TIONGKOK TERHADAP TAIWAN PADA TAHUN 2016-2020	33
3.1 Platform Media Sosial sebagai Media Propaganda Komputasi Tiongkok dan Taiwan	34
3.2 <i>Autonomoust Agents</i> sebagai Aktor Penyebar Propaganda Komputasional Tiongkok	40
3.3 <i>Big Data</i> Taiwan Sebagai Algoritma Penyebaran Propaganda Komputasi Tiongkok	44
BAB 4.....	47
4.1 Kesimpulan	47
4.2 Rekomendasi.....	50
DAFTAR PUSTAKA	51

DAFTAR GAMBAR

3.1 Bendera Nasional Tiongkok yang dikibarkan oleh Wei.....	37
3.2 Konten Kembali Naiknya Tsai Ing Wen pada Akun <i>People's Daily</i> di Weibo...	39
3.3 Komentar <i>troll</i> pada konten yang dibuat oleh akun <i>People's Daily</i> di Weibo.....	40
3.4 Unggahan Target 'Ekspedisi Diba'	43

ABSTRAK

Konflik antara Tiongkok dan Taiwan telah berlangsung dalam waktu yang cukup panjang, bahkan hingga saat ini. Meletusnya perang saudara yang dimenangkan oleh Partai Komunis Tiongkok berhasil memukul mundur Partai Kuomintang untuk mundur ke pulau Formosa hingga menjadi Taiwan. Kejadian ini selanjutnya menjadi konflik berkelanjutan hingga saat ini, dimana Tiongkok beranggapan bahwa Taiwan merupakan wilayahnya dan Taiwan meyakini bahwa mereka merupakan negara berdaulat yang telah merdeka. Tiongkok dengan segala komponen negaranya tentu berupaya semaksimal mungkin untuk menciptakan reunifikasi dan kembalinya Taiwan ke Tiongkok. Salah satu upayanya dapat dilihat pada tahun 2016-2020 ketika Tsai Ing Wen menjadi presiden Taiwan. Tiongkok menerapkan propaganda komputasional untuk mempengaruhi publik Taiwan. Pemanfaatan media sosial seperti Facebook dan Weibo yang banyak digunakan oleh masyarakat publik Taiwan, dipengaruhi oleh *autonomous agents* sebagai aktor penggerak dalam penyebaran pesan dan informasi dalam konsep propaganda komputasional, dengan memanfaatkan *Big Data* sebagai algoritma untuk mengkategorikan serta pengelompokan target pengaruh informasi yang dilakukan oleh Tiongkok. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi opini publik masyarakat Taiwan terhadap pemerintahan Tsai Ing Wen dan Partai Demokratik Progresif.

Kata Kunci: Komputasional Propaganda, platform media sosial, *autonomous agents*, *big data*, Tiongkok, Taiwan.

ABSTRACT

The conflict between China and Taiwan has been going on for quite a long time, even today. The outbreak of a civil war that won by the Chinese Communist Party, succeeded in pushing back the Kuomintang Party to retreat to the Formosa island and then become Taiwan. This incident then became an ongoing conflict up until this day, where Tiongkok thinks that Taiwan is one of its territory and Taiwan believes that they are a sovereign country that has become independent. China with all its component factors certainly makes every effort possible to create reunification and bring back Taiwan to the mainland of Tiongkok. One of their efforts can be seen at the periode of 2016-2020 when Tsai Ing Wen became president of Taiwan. China implies computational propaganda to influence Taiwanese society. The use of social media such as Facebook and Weibo which are widely used by the Taiwanese public, is influenced by autonomous agents as driving actors in spreading messages and information in the concept of computational propaganda, by utilizing big data as an algorithm for categorizing and grouping targets for information influence carried out by China. This is to influence the Taiwanese society's public opiniOn to the Tsai Ing Wen and Democratice Progresive Party.

Keywords: *Computational Propaganda, social media platforms, autonomous agents, big data, China, Taiwan*

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konflik dalam dunia internasional merupakan salah satu kejadian dari akibat adanya upaya untuk mencapai tujuan dan kepentingan dari dua atau lebih pihak yang bersangkutan. Menurut pakar Hubungan Internasional, Graham Evans dan Jeffrey, mereka berpendapat bahwa konflik merupakan kondisi atau situasi yang terjadi sebagai akibat dari adanya tujuan eksklusif dan saling bertentangan dari pihak yang berlawanan (Bakry 2017). Pendekatan ini berlaku terhadap konflik yang berlangsung antara Tiongkok dan Taiwan hingga saat ini. Konflik ini diawali dari terjadinya Perang Saudara China pada tahun 1927 oleh dua kelompok yang memiliki perbedaan pada ideologi dan tujuan yang ingin dicapai pada wilayah dataran China (Wijaya, Sumardi and Sumarjono 2015). Kedua pihak itu ialah, *Chinese Nationalist Party* (partai nasionalis) yaitu partai Kuomintang yang dipimpin oleh Chiang Kai Shek dan *Communist Party of China* (partai komunis Tiongkok) yang dipimpin oleh Mao Zedong (Pertiwi, Fahira and Oktaviany 2021).

Perang saudara ini berlangsung selama dua puluh tahun dan dimenangkan oleh partai Komunis. Setelah kemenangannya, Mao Zedong sebagai pemimpin dari CPC segera mendeklarasikan berdirinya Republik Rakyat Tiongkok pada 1 Oktober 1949 di wilayah dataran Tiongkok dan berpusat di Beijing, sedangkan partai nasionalis di bawah kepemimpinan Chiang Kai Shek yang mengalami kekalahan, memilih untuk melarikan diri ke Pulau Formosa dan meneruskan kepemimpinannya yang berpusat di

Taipei dengan mendeklarasikan dan membangun Republik Tiongkok, atau yang saat ini dikenal sebagai Taiwan (Dewi and Dewi 2019). Adanya deklarasi oleh Chiang Kai Sek menyebabkan wilayah pulau Formosa beserta pulau di sekitarnya terpecah dari wilayah dataran Tiongkok. Pemecahan ini kemudian menciptakan konflik berkepanjangan bagi dua pihak tersebut. Taiwan yang telah memiliki pemerintahannya sendiri, disertai dengan perkembangan yang begitu pesat meyakini bahwa mereka telah menjadi negara berdaulat dengan ideologi nasionalis mereka, namun pernyataan tersebut ditolak oleh Tiongkok dan percaya bahwa Taiwan yang berada di Pulau Formosa merupakan bagian dari provinsi Fujian yang memberontak dari wilayah dataran dan merupakan bagian darinya (Maulana, Roisah and Susetyorini 2016).

Pecahnya Taiwan telah menjadi persoalan bagi Tiongkok karena dianggap telah mengusik wilayah kedaulatannya sehingga reunifikasi menjadi agenda utama bagi Tiongkok, terutama di masa kepemimpinan Xi Jin Ping saat ini (Dewi and Dewi 2019). Tiongkok percaya bahwa dengan kembali bersatunya Taiwan akan menjadikan mereka sebagai satu negara besar dan kuat di dunia internasional sehingga banyak upaya diplomasi yang telah dilakukan, salah satunya dengan menawarkan bentuk “dua sistem dan satu negara” (BBCNews 2022). Meskipun demikian, Taiwan tetap menolak impian reunifikasi maupun solusi yang ditawarkan oleh Tiongkok karena Taiwan meyakini bahwa mereka akan kehilangan nilai-nilai demokrasi dan kebebasan yang telah mereka terapkan selama ini (Li-Schwartz, Pike and Alex Leeds Matthews 2022). Mereka beranggapan bahwa bersatunya kembali Taiwan dan Tiongkok hanya akan membawa kesengsaran berkelanjutan dan pembatasan massal atas hak-hak yang mereka miliki saat ini. Penolakan tersebut terus disuarakan terutama ketika Tsai Ing Wen, Ketua

Democratic Progressive Party atau DPP terpilih menjadi presiden Taiwan ke-14 (IDN Times 2021). Hal ini menjadi perhatian utama bagi Tiongkok karena Tsai Ing Wen merupakan salah satu presiden Taiwan yang dengan tegas menyuarakan kemerdekaan sekaligus penolakan Taiwan untuk bersatu kembali dengan Tiongkok. Tiongkok menanggapi penolakan tersebut dengan respon tegas, salah satunya dengan melibatkan militer, menegaskan kebijakan *One China Policy*, serta penegasan atas undang-undang mengenai pelegalan aksi militer jika Taiwan dengan lantang dan berani menyatakan kemerdekaan mereka atas Tiongkok.

Seiring berjalannya waktu, dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi saat ini, konflik sebagai agenda dengan resolusi yang memerlukan kontak secara langsung, dapat dilakukan secara terselubung bahkan tak terlihat. Perkembangan teknologi informasi kini telah membuka ruang baru, seperti dunia siber dan media sosial yang mampu menghilangkan batas antar negara sehingga sangat memungkinkan untuk sesama negara, termasuk masyarakatnya untuk saling terhubung (Ahmad 2012). Tak hanya itu, dunia siber juga memungkinkan negara maupun masyarakat untuk menyimpan, sekaligus mendapatkan informasi, sebanyak bahkan seluas apapun diinginkan dan dibutuhkan. Kendati demikian, hal ini justru dimanfaatkan oleh beberapa aktor, bahkan negara sebagai instrumen atau pendukung pada konflik atau urusan yang mereka terlibat di dalamnya. Hal ini karena negara cenderung akan memanfaatkan setiap komponen maupun instrumen yang mereka miliki dalam menggapai tujuan maupun kepentingan nasionalnya masing-masing (Saeri 2012). Dunia siber saat ini dianggap ruang yang sangat ideal dalam melakukan hal tersebut dengan menerapkan konsep propaganda komputasional untuk menyebarkan pengaruh

secara digital terhadap negara lain. Propaganda komputasional memungkinkan negara untuk melakukan penggiringan opini, pemalsuan dan manipulasi informasi, dan kegiatan kendali informasi lainnya di dunia siber untuk melemahkan atau mempengaruhi negara lain dengan menjadikan masyarakat publik sebagai target utamanya (Sudibyo,2021).

Dalam perkembangannya, ditemukan kurang lebih 81 negara telah menerapkan propaganda komputasional pada dunia siber dengan memanfaatkan komponen-komponennya untuk melakukan disinformasi serta manipulasi informasi. Media sosial juga menjadi salah satu ruang propaganda komputasional, mengingat media sosial merupakan salah satu *platform* sumber informasi dan data dengan penggunaanya yang sangat besar (D'alessio 2021). Hal ini dapat dilihat salah satunya seperti dilakukan oleh Rusia yang melakukan propaganda komputasional dengan memanfaatkan *Facebook* dan *Twitter* terhadap pemilihan umum yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Donald Trump dan Hillary Clinton (BBC.com 2018). Keterlibatan tersebut diyakini telah dilakukan oleh organisasi di Rusia bernama *Internet Research Agency* (IRA) dan dipercaya telah menjadi perpanjangan tangan terhadap kemenangan Trump saat itu. IRA menjadikan Facebook dan Twitter sebagai platform penyebaran propaganda dengan melemahkan posisi Hillary dan menguatkan posisi Trump agar Trump mampu mendapatkan posisi yang lebih unggul dan lebih kuat dibanding Hillary Clinton (BBC.com 2018). Menurut dokumen yang bocor, tujuan propaganda ini ialah untuk menyebabkan kekacauan sosial di Amerika Serikat sehingga melemahnya posisi negosiasi Hillary Clinton pada pemilu tersebut (CNN Indonesia 2021).

Hal ini tak terkecuali bagi Tiongkok terhadap konfliknya dengan Taiwan.

Tiongkok menyadari bahwa konfrontasi langsung justru dapat memberikan citra buruk sehingga menyebabkan Taiwan akan semakin menolak kehadirannya, ditambah Taiwan yang dianggap memiliki garis keturunan dan kebangsaan yang sama sehingga pendekatan non fisik merupakan pilihan utama bagi Tiongkok saat ini (Sidik, Antaranews.com 2022). Tiongkok juga menyadari bahwa pemanfaatan dunia siber hampir sama *output* nya dengan pemanfaatan kemampuan militer. Tiongkok menerapkan propaganda komputasional dengan melakukan kampanye dunia siber dan disinformasi untuk mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan strategis jangka panjangnya. Sehubungan dengan Taiwan, Tiongkok terus berupaya mencapai tujuannya untuk melunakkan Taiwan agar terciptanya reunifikasi dengan membujuk masyarakat publik Taiwan secara digital di dunia siber dan memanfaatkan komponen didalamnya dengan tujuan untuk melemahkan posisi politik Tsai Ing Wen agar nantinya masyarakat publik Taiwan juga melakukan gerakan untuk mendukung reunifikasi kembali Tiongkok terhadap Taiwan.

Dari pemaparan di atas, penulis melihat bahwa pembahasan tentang upaya reunifikasi oleh Tiongkok terhadap Taiwan dengan menerapkan propaganda komputasional sangat menarik dan penting untuk dibahas. Dalam penelitian terkait Tiongkok dan Taiwan sudah cukup umum seperti pemanfaatan kebijakan *One China Policy* dan kekuatan politik serta militer yang dimiliki oleh Tiongkok dalam konfliknya terhadap Taiwan untuk mencapai reunifikasi, namun jarang literatur yang membahas dengan pemanfaatan dunia siber yang cukup trend di era modern saat ini. Ditambah lagi, perkembangan dunia siber yang terus meningkat disertai peningkatan jumlah penggunaannya menjadi salah satu alasan mengapa propaganda komputasional menjadi

salah satu teknik yang cukup efektif untuk dilakukan oleh sebuah negara. Pada penelitian ini, akan dibahas bagaimana upaya propaganda komputasional oleh Tiongkok terhadap Taiwan dalam upaya reunifikasi dan bagaimana pengaruhnya bagi Taiwan dan Tiongkok.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, Penelitian ini akan memberikan pertanyaan, yaitu “Bagaimana implementasi propaganda komputasional Tiongkok terhadap Taiwan sebagai upaya reunifikasi Tiongkok-Taiwan tahun 2016-2020?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan sebelumnya. Maka, skripsi ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Membahas serta menganalisis mengenai bagaimana implementasi propaganda komputasional Tiongkok terhadap Taiwan sebagai upaya reunifikasi Tiongkok-Taiwan tahun 2016-2020.
2. Menguraikan serta menganalisis mengenai bagaimana Tiongkok melakukan propaganda komputasional kepada Taiwan, terutama terhadap masyarakat publik Taiwan dengan memanfaatkan komponen-komponen didalamnya sebagai upaya dalam melaksanakan proses reunifikasi terhadap Taiwan pada kurun waktu tahun 2016 hingga 2020, yaitu saat Tsai Ing Wen menjabat menjadi presiden Taiwan.

1.4 Cakupan penelitian

Dampak adanya perkembangan teknologi informasi yaitu menghadirkan konsep propaganda komputasional dengan memanfaatkan dunia siber sebagai medianya sehingga menjadi ruang yang cukup ideal bagi negara menyebarkan pengaruhnya kepada pihak-pihak luar, dengan masyarakat publik sebagai target utamanya. Cakupan penelitian ini akan melihat bagaimana propaganda komputasional yang dilakukan oleh Tiongkok terhadap Taiwan sebagai upaya reunifikasi pada tahun 2016 hingga tahun 2020 pada media sosial Facebook dan Weiboo. Kedua media sosial ini secara statistik merupakan media sosial yang banyak digunakan di Taiwan, dan Weibo merupakan media sosial yang ada di Tiongkok dan Taiwan. Penelitian ini juga mencakup mengenai spesifikasi tahun yaitu tahun 2016 hingga tahun 2020, yaitu ketika Tsai Ing Wen yang berasal dari partai nasionalis pertama kali menjabat sebagai presiden Taiwan. Kehadirannya dianggap sebagai ancaman bagi pihak Tiongkok mengingat Tsai Ing Wen salah satu tokoh demokrasi di Taiwan yang menolak dengan keras adanya proses reunifikasi dengan Tiongkok dan menjunjung tinggi kemerdekaan.

1.5 Tinjauan Pustaka

Konflik antara Tiongkok dan Taiwan bukan lagi merupakan hal baru di dunia internasional sehingga sudah banyak literatur – literatur yang membahas tentang isu tersebut. Berikut beberapa literatur serta perbandingannya dengan skripsi ini.

Karina Utami Dewi dan Inneke Firsana Dewi, dalam jurnalnya yaitu “Strategi Pemerintahan Xi Jinping terhadap Taiwan dalam Mengamankan Kedaulatan Tiongkok” menjelaskan tentang konflik antara Tiongkok dan Taiwan secara singkat dan jelas disertai dengan penyebutan serta penjelasan tentang upaya-upaya Tiongkok pada sektor dalam negaranya beserta berbagai komponen dan instrumen yang terkandung didalamnya untuk mempertahankan posisi Taiwan yang merupakan bagian dari wilayah kedaulatan Tiongkok (Dewi and Dewi 2019). Premis dasar pada tulisan ini ialah Tiongkok akan memanfaatkan segala komponen pada sektor-sektor yang mereka miliki untuk tetap menjaga Taiwan agar tidak dapat merdeka. Tulisan yang diberikan sangat informatif, akan tetapi tulisan ini belum menyebutkan bagaimana Tiongkok memanfaatkan sektor teknologi informasi seperti dunia siber terhadap Taiwan. Oleh karena itu, skripsi ini mencoba menganalisa pada sektor teknologi informasi yaitu propaganda komputasional terhadap Taiwan dengan menggunakan dunia siber.

Gary D. Rawnsley dalam jurnalnya yang berjudul “Old Wine in New Bottles: China-Taiwan Computer-Based 'Information Warfare' and Propaganda” juga ikut serta dalam membahas mengenai konflik Tiongkok dan Taiwan secara jelas dan padat (Rawnsley 2005). Ia menggunakan jurnalnya tersebut untuk menjelaskan bagaimana

sejarah, perkembangan serta proses konflik tersebut, dimana Tiongkok telah memanfaatkan internet dan dunia siber sebagai salah satu upaya untuk menyebarkan pengaruh digitalnya terhadap Taiwan, sekaligus untuk menyebarkan informasi palsu dan propaganda-propaganda terkait untuk melemahkan posisi Taiwan yang saat itu dengan tegas menyatakan negara mereka sebagai negara yang telah merdeka secara *de facto* (Rawnsley 2005). Tulisan Gary sangat bermanfaat dan informatif, akan tetapi, tahun penelitian yang ditawarkan telah jauh dari jangka waktu saat ini, oleh karena itu skripsi ini akan menganalisis propaganda komputasional yang dilakukan oleh Tiongkok terhadap Taiwan pada tahun 2016 hingga 2020.

Nicholas J. Monaco dalam tulisannya yang berjudul “Taiwan : Digital Democracy Meets Autocracy” di dalam buku “Computational Propaganda” juga turut serta membahas mengenai keberadaan, perkembangan serta data-data propaganda komputasional yang pernah terjadi dan ada di Taiwan (Monaco 2019). Tulisan ini sangat informatif dan deskriptif, namun tulisan ini sangat berfokus terhadap propaganda komputasional yang ada di Taiwan dan berada di level domestiknya. Meskipun sempat menyebutkan bagaimana Tiongkok melakukan propaganda komputasional di Taiwan, namun penjelasannya diberikan secara umum dan garis besar, maka dari itu, skripsi ini akan menganalisis secara detail dan mendalam pada propaganda komputasional yang dilakukan oleh Tiongkok terhadap Taiwan pada tahun 2016 hingga 2020 sebagai sebuah upaya reunifikasi.

Gillian Bolsover dan Philip Howard dalam tulisannya yang berjudul “Chinese computational propaganda: automation, algorithms and the manipulation of information about Chinese politics on *Twitter* and *Weibo*” membahas mengenai

bagaimana Tiongkok memanfaatkan ruang digital untuk melakukan disinformasi yang beberapa diantaranya melalui *Twitter* dan *Weibo* (Bolsover and Howard 2023). Tulisan ini dengan lengkap menjelaskan mengenai propaganda komputasional yang dilakukan secara domestik maupun internasional serta berfokus kepada upaya propaganda komputasional yang Tiongkok lakukan. Dengan tujuan untuk mempengaruhi opini publik. Penjelasan dalam tulisan ini telah jelas dan sangatlah deskriptif, namun belum menjelaskan bagaimana kemudian propaganda komputasional ini dapat dimanfaatkan untuk urusan luar negerinya, terutama terhadap Taiwan sebagai bentuk upaya dalam proses reunifikasi Tiongkok.

Dari pemaparan di atas, penulis melihat terdapat beberapa literatur yang sudah membahas konflik antara Tiongkok dan Taiwan serta upaya propaganda komputasional yang dilakukan Tiongkok. Akan tetapi belum ada yang berfokus terhadap upaya propaganda komputasional oleh Tiongkok terhadap Taiwan sebagai upaya reunifikasi. Dengan demikian, skripsi ini mengambil sebuah topik dari upaya reunifikasi Tiongkok terhadap Taiwan. Di dalamnya membahas bagaimana Tiongkok melakukan propaganda komputasional sebagai instrumen proses reunifikasi terhadap Taiwan.

1.6 Kerangka Pemikiran

Komponen-komponen serta instrumen yang ada di dunia internasional terus berkembang, bahkan bertambah. Seiring berjalannya waktu, hubungan internasional kian dipengaruhi oleh perkembangan-perkembangan terbaru yang bisa dimanfaatkan oleh negara, tak hanya dalam pengembangan domestiknya tapi juga sebagai alat dalam mencapai kepentingan nasionalnya, salah satunya yaitu propaganda komputasional. Propaganda komputasional terbentuk dari konsep propaganda dan komputasional. Samuel C. Woolley dan Philip N. Howard didalam tulisannya yang berjudul “*Political Communication, Computational Propaganda, and Autonomous Agents*” mendefinisikan propaganda komputasional sebagai kumpulan platform media sosial, *Autonomous Agents* , dan *Big Data* yang memiliki tugas untuk memanipulasi opini publik (Woolley and Howard 2016).

Wooley dan Howard dalam pengertiannya terhadap komputasional propaganda melibatkan tiga komponen utama untuk mendorong terjadinya komputasional propaganda sehingga dapat diterapkan dalam dinamika politik pelakunya. Tiga komponen tersebut terdiri dari Platform media sosial, *Autonomoust Agents*, dan *Big Data*. Tiga komponen ini merupakan pendorong faktor utama dalam keberhasilan negara untuk menerapkan propaganda komputasional dalam menyebarkan pengaruh digitalnya untuk mencapai kepentingan maupun tujuan nasionalnya, yang dijelaskan sebagai berikut :

Platform media sosial terdiri dari infrastruktur informasi dan alat yang digunakan untuk memproduksi dan mendistribusikan konten yang memiliki nilai

individual tetapi mencerminkan nilai bersama; konten yang berbentuk digital dari pesan pribadi, berita, dan gagasan yang menjadi produk budaya; dan orang, organisasi, dan industri yang memproduksi dan mengkonsumsi baik alat maupun isinya (Woolley and Howard 2016). Platform media sosial ini, kemudian akan menjadi tempat beroperasinya *autonomoust agents*.

Autonomoust Agents merupakan kumpulan aktor individu yang dengan sengaja membuat dan menyampaikan pesan untuk mempengaruhi target propagandanya secara politik. *Autonomoust agents* ini terdiri atas bot politik dan *troll* dimana *troll* merupakan individu manusia yang dengan sengaja aktif dalam dunia siber untuk menyebarkan berita maupun pesan untuk mempengaruhi opini publik, sedangkan bot politik merupakan komponen otomatisasi yang dibuat untuk mengotomatisasi penyebaran pesan untuk tujuan politik (Woolley and Howard 2016).

Big Data didefinisikan sebagai kumpulan data pada satu jaringan besar yang menyimpan memori atau 'ingatn' atas perilaku, tindakan, dan ketertarikan pengguna internet yang nantinya akan dimanfaatkan sebagai 'pengelompok' terhadap propagandanya (Woolley and Howard 2016).

Ketiga komponen ini akan bekerja saling terhubung antar satu dengan lainnya sehingga nantinya akan digunakan oleh individu non negara atau pun aktor negara dalam menyebarkan pengaruhnya dengan propagandanya. Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan konsep propaganda komputasional dalam menganalisis propaganda komputasional sebagai upaya reunifikasi oleh Tiongkok terhadap Taiwan, yaitu ketika Tsai Ing Wen menjadi presiden Taiwan pada tahun 2016-2020. Konsep ini

akan digunakan dalam melihat bagaimana upaya Tiongkok dalam memanfaatkan dunia siber beserta komponennya dalam upaya reunifikasi terhadap Taiwan.

1.7 Argumen Sementara

Dalam penelitian ini, saya meletakkan argumentasi sementara saya mengenai propaganda komputasional oleh Tiongkok terhadap Taiwan sebagai proses reunifikasi merupakan sebuah keberhasilan oleh Tiongkok dalam mempengaruhi opini publik Taiwan dengan menggunakan komponen-komponen dunia siber dalam melancarkan propaganda komputasionalnya, salah satunya terhadap proses pemilihan yang terjadi di Taiwan. Dalam komputasional propaganda, terdapat 3 komponen didalam dunia siber, yaitu platform media sosial yang digunakan yaitu Facebook dan Weibo merupakan platform yang cukup mudah dan berpotensi untuk digunakan sebagai platform propaganda komputasional Tiongkok. Platform ini kemudian dijadikan ruang penyebaran propaganda oleh *autonomoust agents*, berupa *troll* dan *bot* yang dilakukan oleh 50Cents karena akses terhadap Facebook dan Weibo cukup mudah untuk disisipi dan diakses para *autonomous agents*. Untuk memudahkan prosesnya, *autonomous agents* dilengkapi pengetahuan yang terdapat di *big data* tentang masyarakat publik Taiwan di Facebook dan Weibo untuk klasifikasi, pengelompokan, serta efektifitas pesan dan informasi yang disebarkan agar dapat mempengaruhi opini publik Taiwan.

Tiongkok dengan kemampuan teknologi informasinya saat ini tentunya memiliki potensi lebih kuat untuk mempengaruhi dunia digital masyarakat publik Taiwan. Maka dari itu, pelaksanaan propaganda komputasional merupakan suatu

tindakan yang sangat memungkinkan bagi Tiongkok yang berupaya untuk melakukan reunifikasi dengan Taiwan. Tiongkok dengan kemampuan teknologi informasinya saat ini tentunya memiliki potensi lebih kuat untuk mempengaruhi dunia digital masyarakat publik Taiwan. Maka dari itu, pelaksanaan propaganda komputasional merupakan suatu tindakan yang sangat memungkinkan bagi Tiongkok yang berupaya untuk melakukan reunifikasi dengan Taiwan.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode kualitatif. Penelitian menggunakan metode ini yaitu dengan menerapkan proses penyelidikan dan pemahaman untuk menjelaskan propaganda komputasional dalam upaya reunifikasi oleh Tiongkok terhadap Taiwan pada tahun 2016-2020.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini yaitu pemerintahan, serta institusi maupun kelompok yang dibentuk, dalam hal ini Tiongkok. Sedangkan objek yang akan diteliti yakni bagaimana cara propaganda komputasional oleh Tiongkok dalam upayanya untuk mewujudkan reunifikasi atas Taiwan pada tahun 2016 hingga tahun 2020.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu data sekunder. Data sekunder merupakan data yang didapat melalui berita isu yang sejenis, buku, jurnal,

artikel serta laporan berupa fakta dan literatur lainnya seperti *website internet* yang dapat digunakan untuk menunjang penelitian ini serta memberikan proses pemahaman yang mendalam.

1.8.4 Proses Penelitian

Proses pengumpulan data akan dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari beberapa sumber, lalu menganalisa dari sumber-sumber yang telah didapat baik website, jurnal atau kajian literatur yang telah didapat melalui menyeleksi dari sumber yang memiliki kredibilitas terpercaya. Proses yang dilakukan selanjutnya adalah menentukan sub-bab dari data yang telah diseleksi dan akhirnya sampai dengan pemaparan kesimpulan berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan.

1.9 Sistematika Pembahasan

Bab 1, menjelaskan mengenai latar belakang hingga metode penelitian. Bab ini berguna untuk menjadi pondasi atau dasar dari penelitian untuk menganalisis studi kasus mengenai propaganda komputasional oleh Tiongkok pada bab III.

Bab 2, menguraikan mengenai sejarah konflik dan dinamika reunifikasi Tiongkok-Taiwan, hingga institusi dan lembaga teknologi di Tiongkok. Beberapa aspek tersebut digunakan dengan tujuan untuk memahami konteks secara detail pada bagian analisis di bab III.

Bab 3, peneliti menggunakan ataupun penggunaan konsep propaganda komputasional menjadi beberapa variabel penting.

Bab 4, peneliti menyimpulkan hasil dari penelitian dari bab I - bab III yang mencakup rekomendasi penelitian yang dapat dilakukan selanjutnya.

BAB 2

SEJARAH DAN DINAMIKA KONFLIK SERTA UPAYA REUNIFIKASI OLEH TIONGKOK TERHADAP TAIWAN

Konflik yang dialami antara Tiongkok dan Taiwan merupakan konflik yang cukup kompleks. Konflik yang lahir akibat perbedaan ideologi dan selisih paham antara dua belah pihak berdampak cukup besar sehingga menyebabkan terpecahnya satu daerah besar yang hingga saat ini saling mempertahankan klaim atas masing-masing wilayah. Konflik Tiongkok dan Taiwan telah memasuki berbagai babak selisih, mulai dari adanya konfrontasi langsung, pengadaaan pertemuan untuk negosiasi, penawaran kerjasama dan kebijakan bersama, bahkan melibatkan kekuatan militer untuk tercapainya reunifikasi. Meskipun demikian, segala upaya reunifikasi yang telah dilakukan oleh Tiongkok terhadap Taiwan hingga saat ini belum berhasil, bahkan konflik ini semakin memanas seiring berjalannya waktu, terlebih ketika Taiwan dipimpin oleh sosok yang menolak dengan keras terkait kehadiran Tiongkok pada urusan Taiwan, yaitu dengan kata lain menolak adanya intervensi, termasuk upaya reunifikasi dan menuntut terwujudnya kemerdekaan Taiwan. Hal ini menyadarkan Tiongkok bahwa upaya pendekatan secara frontal dan kontak langsung terhadap Taiwan seperti yang telah disebutkan sebelumnya hanya akan semakin menjauhkan Taiwan. Tiongkok kemudian beralih fokus dan memanfaatkan pendekatan yang lebih halus, yaitu dengan memanfaatkan dunia siber dan melakukan pendekatan lebih kepada masyarakat publik Taiwan.

Dengan demikian, dalam Bab 2 ini, penulis akan membahas mengenai sejarah dan dinamika konflik antara Tiongkok dan Taiwan, dinamika upaya reunifikasi oleh Tiongkok terhadap Taiwan, hingga perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan dunia siber oleh Tiongkok dalam konfliknya terhadap Taiwan.

2.1. Sejarah dan Dinamika Konflik Tiongkok dan Taiwan serta Upaya Reunifikasinya

2.1.1 Sejarah Konflik antara Tiongkok dan Taiwan

Sebelum terjadinya pemisahan, Tiongkok dan Taiwan merupakan satu bagian di daratan China dan merupakan negara besar yang menganut nilai-nilai kekaisaran dalam menjalankan dinamika wilayahnya, sebelum akhirnya runtuh pada masa dinasti Ch'ing beserta dengan nilai-nilai imperialismenya pada tahun 1911. Keruntuhan dinasti Ch'ing diakibatkan oleh kegagalannya dalam mempertahankan kesatuan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya sehingga memunculkan dorongan oleh penduduknya untuk menuntut adanya perubahan bagi daratan Tiongkok dalam menjalankan negaranya (Wijaya, Sumardi and Sumarjono. 2015). Tiongkok menerima sistem baru yang disebut dengan 'Negara Partai', dimana kepemimpinan negara tersebut akan dipimpin dan dijalankan oleh satu partai dominan didalam pemerintahannya. Sistem ini diterapkan saat itu dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan sosial demokrasi sehingga akan melahirkan sebuah sistem republik di Tiongkok (FitzGerald 1966). Gagasan nilai-nilai demokrasi pertama kali dibawa oleh Sun Yat Sen, seorang tokoh yang menjadi pendiri partai Kuomintang Tiongkok atau

yang dikenal sebagai Parta Nasionalis Tiongkok. Sun Yat Sen memiliki tujuan yang ingin diwujudkan dengan menerapkan prinsip yang disebut sebagai "Tiga Prinsip Rakyat" yang sekaligus menjadi langkah awal untuk mengenalkan nilai-nilai demokrasi ke wilayah daratan Tiongkok (Yung-ching 1989). Beserta dengan kehadiran Sun Yat Sen juga, partai Kuomintang akhirnya terbentuk dan berhasil menjadi partai tunggal yang memimpin wilayah daratan Tiongkok.

Namun, Partai Kuomintang yang menyongsong nilai-nilai demokrasi harus menghadapi kehadiran oposisi. Tak hanya ideologi yang dibawa Sun Yat Sen yang berhasil masuk Tiongkok, ideologi komunisme yang dimiliki Uni Soviet juga perlahan masuk ke wilayah daratan Tiongkok (Mark 1951). Pendekatannya pun cukup mudah mengingat jarak geografis yang saling berdekatan sehingga sangat mudah bagi Uni Soviet untuk menyebarkan gagasan dan ideologi komunisnya. Sehingga, pada tahun 1920, Gregori Voitinsky, seorang direktur Departemen Oriental Komintern dari Uni Soviet, datang ke Cina untuk membentuk Partai Chinese Communist Party (CCP) atau Partai Komunis China bersama dengan Li Ta-chao dan Ch'en Tu-hsiu. Pembentukan ini awalnya ditolak keberadaannya oleh Sun Yat Sen dikarenakan nilai-nilai komunis yang dianggap tidak cocok untuk diterapkan di wilayah daratan Tiongkok, Namun, tak lama kemudian, pada tahun 1923, dengan pendekatan yang cukup panjang, Sun Yat Sen yang awalnya menolak mulai menerima dan, bahkan mengizinkan anggota individu dari partai komunis untuk menjadi bagian didalam partai Kuomintang, meskipun dengan pernyataan, ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan sebelumnya Partai Kuomintang dan Partai Komunis kemudian menciptakan sebuah aliansi untuk menjalankan pemerintahan di Tiongkok sekaligus bekerjasama untuk

melawan penjajahan Jepang saat itu. Aliansi ini kemudian disebut sebagai “United Front” atau Persatuan Terdepan (Ching-yao 1981).

Bergabungnya komunis di partai Kuomintang, memberikan mereka kesempatan ini untuk dimanfaatkan sebaik mungkin dalam menyebarkan pengaruh dan gagasan-gagasan komunis di Tiongkok. Kelompok komunis memanfaatkan partai KMT itu sendiri serta pengaruhnya untuk meningkatkan anggota komunis mereka untuk mewujudkan tujuan mereka sendiri (T. H.-e. Chen 1957). Hal ini telah menjadi dugaan bagi anggota partai KMT sendiri, dimana bergabungnya kelompok komunis munculnya gesekan kekuatan politik serta timbulnya asumsi terhadap penyebaran propaganda yang dilakukan oleh kelompok komunis untuk mencapai tujuan revolusioner mereka sendiri. Namun terlepas demikian, pihak partai KMT dan kelompok komunis bekerjasama dalam mengalahkan para kelompok panglima perang yang berada di wilayah Tiongkok sehingga partai KMT sepenuhnya menjadi pemerintah tunggal di Tiongkok.

Kondisi ini tak berlangsung begitu lama karena Sun Yat Sen, ketua Partai Kuomintang meninggal dunia. Kondisi ini menyebabkan hiatusnya posisi kepemimpinan di Partai Kuomintang. Pergejolakan terjadi didalam partai Kuomintang karena adanya perebutan kuasa partai dari dalam sehingga keadaan partai saat itu cukup terombang-ambing. Adanya hasutan-hasutan dan propaganda komunis, serta ketakutan yang berlebih didalam partai menimbulkan rasa saling tidak percaya antara satu dan lainnya (Shirley 1965).

Chiang Kai Sek, beberapa waktu kemudian, menjadi sosok penerus kepemimpinan Sun Yat Sen. Ia merupakan sosok yang sangat mendukung pemikiran

Sun Yat Sen dalam menerapkan nilai-nilai demokrasi pada Tiongkok dan ia juga memiliki tujuan untuk melanjutkan mimpi Sun Yat Sen dalam mewujudkan demokrasi di Tiongkok. Kecakapannya dalam memimpin serta pengaruhnya yang cukup besar memberikannya kemampuan untuk mengalahkan dan benar-benar menumpaskan pemimpin panglima perang yang ada di Tiongkok (Azzara 2022). Namun, perlu diketahui bahwa Chiang Kai Sek merupakan sosok yang sangat menolak adanya ideologi komunis dan menurutnya ideologi tersebut sangatlah tidak sesuai untuk Tiongkok. Bahkan pada tahun 1927, saat ekpedisinya dilaksanakan, ia melakukan pembantaian besar-besaran terhadap kelompok komunis di markas Partai Komunis China, melakukan diskriminasi, dan bahkan berani untuk memberhentikan secara paksa penasehat Uni Soviet didalam partai Kuomintang. Chiang Kai Sek membuat pemerintahan nasionalis di Nanking dan menduduki wilayah tersebut sebagai pusat pemerintahan partai Kuomintang. Ia kemudian menjadi pemimpin untuk Partai Kuomintang dan sekaligus menjadi pemimpin China saat itu. (Shirley 1965).

Kaum Komunis kemudian melarikan diri dan memilih untuk membangun kekuatannya sendiri di wilayah hutan-hutan bagian untuk mengubah kebijakan mereka serta cara kepemimpinan mereka. Partai Komunis pun tetap berjuang untuk meraih mimpi dan tujuan revolusioner mereka dengan mencari dukungan dan menyebarkan pemikiran mereka. Gerakan ini kemudian dipimpin oleh Mao Zedong dan seorang panglima perang lainnya yang akan menimbulkan konflik bersenjata antara Partai Komunis China dan Partai Kuomintang. Konflik bersenjata ini tak berlangsung lama mengingat Jepang yang mulai untuk mencoba menjajah kembali wilayah daratan Tiongkok sehingga Partai Komunis Tiongkok dan Partai Kuomintang bekerja sama

kembali untuk mengusir Jepang dari China(FitzGerald 1966). Partai Komunis Tiongkok yang seharusnya mampu memberikan bantuan untuk Partai Kuomintang, justru tidak begitu maksimal karena adanya Jepang memberikan mereka kesempatan besar untuk mengalahkan Partai Kuomintang di kemudian hari. Mereka bahkan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menambah jumlah pasukan mereka dan bahkan melakukan penyerangan terhadap kekuatan militer Partai Kuomintang (Ching-yao 1981).

Setelah kerjasama tersebut, Jepang memang kalah, namun Partai Komunis dan Partai Kuomintang yang sudah kehilangan kepercayaan antar satu dengan lainnya justru berlomba-lomba dalam meluaskan pendudukan daerah mereka. Sayangnya Partai Kuomintang yang telah mengalami banyak kerugian dalam proses pengusiran Jepang dan tidak memiliki banyak dukungan akibat korupsi dan kesalahan dalam mengelola pendukungnya, menjadikan partai komunis lebih unggul dan mampu menang dengan mudah. Meskipun sudah telah terjadi perbincangan lanjutan untuk menyatukan kedua pihak dan membangun kembali China yang sudah mengalami banyak kerusakahan, namun hal tersebut sia-sia dan justru mengembalikan konflik bersenjata yang sebelumnya sempat terhenti dan menyebabkan terjadinya Perang Saudara China (The Editors of Encyclopaedia Britannica 2023).

Puncak perang ini terjadi pada tahun 1946 dan berakhir pada tahun 1949. Konflik ini diakhiri dengan kekalahan Partai Kuomintang dan Chiang Kai Shek beserta pendukungnya untuk melarikan diri ke Taiwan (Pulau Formosa), sedangkan Mao Zedong mendeklarasikan pembentukan Republik Rakyat Tiongkok pada 1 Oktober 1949 di wilayah Daratan Tiongkok, Beijing. Konflik antara nasionalis dan komunis

mengakibatkan pecahnya pulau Formosa dari wilayah daratan Tiongkok dengan Republik Tiongkok yang dipimpin oleh Partai Komunis Tiongkok dan Pulau Formosa yang dikuasai oleh Partai Kuomintang (Palmer 1950).

2.1.2 Dinamika Upaya Reunifikasi oleh Tiongkok terhadap Taiwan

Semenjak berakhirnya Perang Saudara antara Partai Komunis Tiongkok dengan Partai Kuomintang, kedua belah pihak bersama-sama dalam mendeklarasikan kepemilikan mereka atas wilayah yang mereka tempati, dimana Tiongkok dengan Partai Komunis Tiongkok berada di wilayah Tiongkok Daratan dengan nama Republik Rakyat Tiongkok dan Partai Nasionalis berada di pulau Formosa yang berubah nama menjadi Republik Tiongkok atau yang saat ini kita kenal sebagai Taiwan. Kedua wilayah ini kemudian menunjukkan perkembangan yang cukup pesat, mengingat keduanya merupakan wilayah yang harus berdiri setelah menghadapi dinamika konflik yang cukup berat.

Tiongkok yang dipimpin oleh Mao Zedong hingga tahun 1970-an terus berkembang dengan ide pemikirannya untuk memimpin Tiongkok saat itu. Pemikirannya dan perkembangannya untuk Tiongkok itu kemudian dilanjutkan oleh Deng Xiaoping, yang kemudian akan berhasil untuk meningkatkan perekonomian Tiongkok waktu itu hingga mampu bersaing dengan perekonomian Amerika Serikat (Azzara 2022). Deng melakukan reformasi dengan mengubah sistem ekonomi dan memulai periode pertumbuhan ekonomi yang cukup cepat dalam peningkatannya sehingga mengeluarkan Tiongkok dari isolasi akibat konflik yang terjadi dan masuk kedalam ekonomi dunia modern. Deng Xiaoping bahkan mendapat julukan atas

keberhasilannya sebagai “*father of the economic revolution*” (Naughton 1993). Tiongkok terus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu dengan iringan pemimpin-pemimpin kuat yang berhasil di setiap masa jabatannya masing-masing.

Berbanding terbalik dengan Taiwan, Taiwan yang dipimpin oleh Chiang Kai Sek pada pengungsian tersebut harus berjuang untuk membentuk kembali sistem negara dan kepemimpinan di Taipei serta harus berjuang dalam membangun Taiwan. Hal ini juga bukan lain karena kelompok nasionalis merupakan kelompok yang cukup terdampak setelah konflik yang mereka lalui. Perkembangannya terbilang cukup lambat mengingat pukulan besar yang diterima atas kekalahannya saat itu. Namun, Amerika Serikat pada tahun 1950an kemudian maju untuk memberikan bantuan yang cukup besar bagi Taiwan. Sepanjang periode tahun 1950 hingga tahun 1960, Taiwan mendapatkan bantuan oleh Amerika Serikat dan dimanfaatkan sebaik mungkin dalam mereformasi, melakukan penyesuaian, perencanaan, pelaksanaan program-program wilayah pada bidang ekonomi, budaya, pendidikan, dan membangun kekuatan militer untuk melindungi wilayahnya (Walker 1959).

Seiring berkembangnya dua wilayah ini, konflik diantaranya kemudian memasuki babak baru, dimana Taiwan yang ingin membangun hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat dianggap sebagai suatu ancaman terhadap wilayah kedaulatan Tiongkok. Belajar dari tindakan militerisasi dan konflik bersenjata yang telah dilakukan sebelumnya, Tiongkok mulai menerapkan pendekatan yang lebih halus dengan menggunakan kalimat reunifikasi dalam upayanya untuk mengembalikan Taiwan kepada Tiongkok. Tiongkok yang awalnya menggunakan tenaga militer

kemudian berganti kepada pengakuan terhadap *status quo* yang ada pada Taiwan saat itu, sehingga pada tahun 1979 Tiongkok mulai mengubah sikapnya terhadap Taiwan, secara politik maupun ekonomi untuk menyudahi konflik antara kedua belah pihak (Hsiao and Sullivan 1980).

Berawal dari Deng Xiaoping yang mengajukan gagasan “pembebasan Taiwan” dengan mengajukan proposal mengenai dua negara dan satu sistem sebagai bentuk untuk menyatukan Taiwan dengan Tiongkok. Dalam gagasan ini, secara umum dijelaskan bahwa Taiwan akan tetap diperbolehkan untuk menjaga *status quo* nya saat itu dan akan memiliki kebebasan otonomi tinggi sebagai wilayah istimewa serta Tiongkok tidak akan ikut campur dalam urusan internal Taiwan. Salah satu poin penting juga ialah Taiwan tetap boleh menjaga dan mempertahankan sosial-ekonomi yang mereka terapkan saat itu dan juga ketika Taiwan mengalami kesulitan dana, maka kewajiban bagi wilayah daratan Tiongkok untuk membantu Taiwan sesuai yang dibutuhkan (Chiu 1983). Meskipun demikian, pendekatan Deng Xiaoping belum bisa menciptakan reunifikasi tersebut dikarenakan pengalaman buruk terhadap Partai Komunis yang dialami oleh Partai Kuomintang pada masa konflik dahulu di wilayah daratan Tiongkok sehingga belum meraih kepercayaan Taiwan sehingga rencana tersebut sulit untuk direalisasikan.

Maju beberapa dekade kemudian, Kepemimpinan Tiongkok berada di tangan Hu Jintao, dimana Hu melanjutkan keinginan untuk reunifikasi dengan Taiwan. Hu Jintao memberikan pendekatan yang lebih halus dimana ia menawarkan perjanjian damai dengan mengadakan kerjasama dalam bidang politik, sosial maupun ekonomi (Ding 2012). Upaya Hu Jintao juga terbilang cukup mudah untuk menciptakan kerjasama

tersebut, mengingat di Taiwan, presiden Ma Ying-jeo yang berasal dari partai Kuomintang tertarik untuk membangun kerjasama dan mengikuti ketentuan yang diberikan Tiongkok dalam upaya untuk mencapai perjanjian damai, meskipun sempat ditentang oleh oposisi Partai Kuomintang di Taiwan, yaitu *Democratic Progressive Party* atau DPP yang merupakan partai yang menolak reunifikasi dan menuntut kemerdekaan atas Taiwan. Tiongkok dan Taiwan saat itu memiliki ikatan yang cukup kuat, terutama pada kerjasama ekonomi. Saling bergantungnya kedua belah pihak dalam pertumbuhan ekonominya melalui kerjasama yang dibuat menjadikan masa tersebut sebagai masa keemasan bagi dua pihak yang telah berkonflik cukup lama (Wiratama 2017). Upaya reunifikasi ini pun dilanjutkan oleh Tiongkok pada masa kepemimpinan Xi Jinping pada tahun 2013. Dalam kepemimpinan Xi Jinping dan Ma Ying Jeo, juga terjadi kerjasama yang baik, bahkan dalam sektro ekonomi maupun pariwisata, walaupun saat itu persoalan mengenai kejelasan status Taiwan dan Tiongkok belum jelas (Apriliana 2015). Sejak pertemuan antara Xi Jinping dan Ma Yiong-Jeou terjadi, perlahan namun pasti hubungan ekonomi yang terjadi antara Tiongkok dan Taiwan menjadi semakin erat dan meningkat. Hal tersebut membuat keberadaan Tiongkok sangat berharga bagi Taiwan karena, sebagian besar perekonomian Taiwan bergantung kepada Tiongkok yang bertindak sebagai pasar bagi Taiwan dan hal tersebut juga berlaku bagi Tiongkok yang ingin melakukan pendekatan terhadap Taiwan. Xi Jinping melanjutkan kebijakan Hu Jintao terhadap Taiwan untuk mewujudkan reunifikasi, namun Xi dalam pendekatannya lebih mengutamakan terhalangnya kemerdekaan Taiwan dibandingkan menuntut percepatan reunifikasi. Ia lebih mengkotakkan hubungan Tiongkok dan Taiwan kedalam kebijakan “Satu China”,

dimana Taiwan, bersama dengan negara lain harus mengakui bahwa hanya terdapat satu china yaitu Tiongkok. Dalam pidatonya, ia menganut persaudaraan antara masyarakat Tiongkok. Dia menyatakan bahwa masyarakat china, yang berada maupun diluar wilayah Tiongkok, merupakan satu kekeluargaan dan persaudaraan besar yang memiliki darah dan kebudayaan serta leluhur yang sama dan memiliki keinginan yang sama untu mencapai tujuan yang besar untuk wilayah China. Namun, kondisi kerjasama tersebut dalam ancaman, mengingat partai Kuomintang gagal untuk menjadi presiden di Taiwan. President Taiwan yang maju saat itu ialah Tsai Ing Wen, sosok yang berasal dari Partai Progresif Demokrat, partai yang menuntut kemerdekaan Taiwan dan melepaskan diri dari jeratan Tiongkok pada tahun 2016 (BBC News Indonesia 2016).

Partai Demokrat Progresif awalnya terbentuk pada tahun 1986 dan hanyalah sebatas partai biasa yang ada di Taiwan karena pengaruh keunggulan partai Kuomintang yang mendominasi politik Taiwan sejak deklarasinya atas pulau Formosa (Britannica 2023). Partai ini baru mendapatkan pengakuannya pada maret tahun 2000 setelah terpilihnya Presiden Chen Shui-Bian membuat adanya kebangkitan partai Partai Demokratik Progresif (Rigger 2001). Partai Demokratik Progresif merupakan kumpulan masyarakat Taiwan yang beranggapan bahwa Taiwan akan lebih berkembang dan lebih baik jika mereka merdeka dan terlepas dari pengaruh Tiongkok sehingga partai ini menunjukkan sikap untuk tidak melakukan unifikasi dengan Tiongkok (Ho and Huang 2017). Hal ini dapat dilihat dari pendirian Chen Sui-Bian yang menganggap bahwa konsep *State-to-State* bukan menjadi suatu penyelesaian dalam konflik Tiongkok-Taiwan. Saat itu juga terdapat kerjasama erat antara Taiwan dan Amerika Serikat, sehingga kerjasama tersebut dianggap sebagai sebuah ancaman bagi

Tiongkok, terutama kerjasama yang dilakukan pada sektor militer Taiwan (Goldstein and Schriver 2001)

Ketegangan hubungan Tiongkok dan Taiwan terulang kembali dan bahkan diperparah akit Tsai Ing Wen yang tidak mengakui konsensus 1992, sebuah konsensus yang dibuat oleh Tiongkok dan Partai Kuomintang terkait status Taiwan yang melahirkan kebijakan Satu China (Yeni Wong and Wang 2016). Tsai Ing Wen bahkan menganggap hubungan Tiongkok dan Taiwan merupakan hubungan antar negara dan bukanlah hubungan lintas selat (Chen and Cohen 2019). Sikap Tsai Ing Wen dianggap telah melanggar kerjasama yang telah dibangun selama berpuluh tahun dan dapat menyebabkan ketidakamanan wilayah kedaulatan atas Tiongkok.

Xi Jin Ping mengambil tindakan tegas dengan menggalakkan program reunifikasi sebagai agenda utama dalam kepemimpinannya. Dalam kebijakannya terhadap Taiwan untuk bersatu kembali, melalui Konsensus 1992 yang mengarah kepada prinsip *One China*, Xi Jinping berupaya untuk membuat Taiwan kembali kepada wilayah Tiongkok dengan cara menegaskan hubungan antara Tiongkok dengan Taiwan yang merupakan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Ia menegaskan kembali tentang nilai-nilai konsensus 1992 yaitu pengakuan atas Kebijakan Satu China atau *One China Policy*. Xi juga menyampaikan bahwa dalam menyelesaikan konflik selat Tiongkok dan Taiwan ialah dengan mewujudkan reunifikasi damai dengan Taiwan menyetujui gagasan satu negara dengan dua sistem (J. Huang 2017). Disisi lain Prinsip *One China* juga diterapkan oleh Xi Jinping dalam kebijakan politik luar negerinya. Xi menghimbau bahwa setiap negara yang ingin

menjalin hubungan diplomatik dengan Tiongkok harus mengakui prinsip *One China* dengan mengakui Taiwan sebagai bagian dari Tiongkok.

Seiring berjalannya waktu, Xi Jinping melihat aksi terang-terangan oleh pihak Taiwan yang dipimpin Tsai Ing Wen untuk menyuarakan kedaulatannya. Tindakan Tsai Ing Wen ini berhasil memanaskan kembali konflik yang sudah lama diredamkan. Tiongkok kemudian mengambil langkah-langkah yang cukup berani dalam memperingatkan dan menegaskan kepada Taiwan tentang konsensus 1992 dan kebijakan “Satu China” atau *One China Policy* melalui beberapa sektor seperti penggunaan militer, penetapan kebijakan ekonomi dan politik, serta menghalangi Taiwan secara langsung untuk terlibat dalam dinamika organisasi internasional seperti UN. Tak hanya itu, Tiongkok yang telah memiliki pengalaman untuk memiliki hubungan yang cukup baik ketika Taiwan dipimpin oleh Partai Kuomintang, Tiongkok diduga terlibat dalam mempengaruhi masyarakat publik Tiongkok ketika masa pemilihan berlangsung. Hal ini terjadi dengan memanfaatkan dunia siber untuk mendukung kandidat dari Partai Kuomintang, serta mendiskreditkan Partai Demokratik Progresif.

2.2 Tata Kelola Pemanfaatan Dunia Siber Tiongkok pada Konflik Tiongkok dan Taiwan

Pada perkembangannya yang begitu cepat, tentu diperlukan aturan dan institusi terkait dengan dunia siber yang saat ini terus berkembang dan digunakan oleh banyak orang. Di Tiongkok sendiri, terkait dengan dunia siber, memiliki badan khusus yang

terdiri dari dua, yaitu Departemen Propaganda Pusat dan *United Front*. Departemen Propaganda Pusat merupakan pilar kontrol informasi pertama Tiongkok dan menjadi pusat pada alat propaganda Partai Komunis Tiongkok. Badan ini didirikan pada tahun 1924. Seiring berjalannya waktu, badan ini mengakses setiap saluran komunikasi massa di Tiongkok, mengawasi konten dari penerbitan cetak dan media penyiaran hingga dunia maya, seni, dan pendidikan. Departemen Propaganda Pusat juga memimpin indoktrinasi ideologis anggota partai dan mendukung kegiatan propaganda yang dilakukan oleh kantor-kantor pemerintah biasa. Badan ini bertanggung jawab atas bidang-bidang seperti penegakan hukum, perizinan media, hingga regulasi internet (Diresta, et al. 2020). Departemen Propaganda Pusat akan merambah setiap saluran komunikasi massa di Tiongkok, mengawasi konten mulai dari penerbitan cetak dan media penyiaran hingga dunia maya, seni, dan pendidikan sekaligus memimpin indoktrinasi ideologi anggota partai dan mendukung kegiatan propaganda yang dilakukan oleh kantor-kantor pemerintah biasa. Secara formal, lembaga ini berkoordinasi dengan badan-badan negara yang bertanggung jawab di bidang-bidang seperti penegakan hukum, perizinan media, dan regulasi internet, namun dalam praktiknya batas-batas antara badan-badan tersebut menjadi kabur.

Tak hanya itu, Tiongkok dibawah pemerintahannya Xi Jinping telah menyiapkan dua program yang dapat mengontrol internet. Program tersebut bernama “*Great Firewall*” yang memiliki tujuan untuk menyensor konten internet yang diproduksi di Tiongkok (R. Hsiao 2018).

Pada dasarnya semua informasi yang ada di Tiongkok dikendalikan secara mandiri oleh masyarakat Tiongkok namun, akses tersebut diawasi oleh *Great Firewall* yang dapat memblokir seluruh domain dan IP yang dapat diakses di dalam perbatasan Tiongkok. Selain melakukan pemblokiran terhadap domain dan IP yang tidak sesuai, Sistem konfigurasi Great Firewall juga dapat mengidentifikasi dan memblokir informasi yang mengandung kata kunci dan frasa tertentu ketika suatu pengguna mencoba untuk mencari kata tersebut. Great Firewall berusaha untuk mengalihkan akses tersebut melalui *Cache Poisoning*, Pemblokiran alamat IP dan pemblokiran VPN. Hal tersebut berdampak langsung kepada pengalaman berselancar masyarakat Tiongkok yang ingin mengakses internet di wilayah tersebut. Beberapa kemungkinan akan terjadi seiring diberlakukannya *Great Firewall* seperti menurunnya kecepatan dan kinerja dari situs web tersebut karena situs tersebut harus melewati beberapa tahapan pemeriksaan intensif yang dapat menyebabkan masalah kinerja kerja terlebih pada saat jam kantor (Kerner 2022).

Selain itu, Tiongkok juga memiliki CCCI (*Central Commission for Cybersecurity and Informatization*) yang awalnya dikenal sebagai CLGCI (*Central Leading Group for Cybersecurity and Informatization*) pada tahun 2018. Perubahan tersebut dilatar belakangi dengan ambisi Xi Jinping untuk mengejar ketertinggalan Tiongkok dalam perkembangan *cybersecurity*. secara struktur institusi CCCI berada dibawah naungan CCCPC (*Central Committee of the Communist Party of China*) dengan cara melibatkannya dalam setiap pengambilan keputusan dan

mengimplementasikan kebijakan tentang berbagai isu terkait internet yang ada di Tiongkok (CNNIC 2008)

Selama masa pemerintahan Xi Jinping, CCCI mengatur penggunaan nama pengguna di internet Tiongkok, kesesuaian pernyataan yang dibuat secara online, jaringan pribadi virtual dan konten yang berada di portal internet Tiongkok. Adapun tugas umum CCCI adalah mencari informasi tentang pengguna internet dan situs website yang melakukan pemberitaan yang dianggap mengandung pesan disinformasi atau informasi yang seharusnya tidak dikonsumsi oleh masyarakat Tiongkok. Hal ini dapat dilihat ketika CCCI sering kali membersihkan pemberitaan seperti pada tahun 2020, CCCI melakukan tindakan sensor sebanyak dua kali untuk We-Media selama tiga bulan dan membersihkan pemberitaan yang mengandung konten politik dan agama yang dianggap tidak sesuai dengan *Cybersecurity Law of the People's Republic of China* yang mengatur tentang peralatan jaringan utama (Shambaugh 2007).

BAB 3

**PROPAGANDA KOMPUTASIONAL OLEH TIONGKOK TERHADAP
TAIWAN PADA TAHUN 2016-2020**

Pendekatan konfak fisik secara langsung yang dilakukan oleh Tiongkok pada masa kepemimpinan Mao Zedong dalam memperebutkan kembali Taiwan mengalami kegagalan besar. Pendekatan oleh Deng Xiaoping dan Hu Jintao yang menggunakan pendekatan lebih halus melalui kerjasama dan gagasan “dua sistem dan satu negara” bahkan tidak membuahkan hasil. Hal ini kemudian menjadi perhatian utama bagi Xi Jinping yang telah melihat pemanfaatan sektor-sektor sebelumnya untuk menyatukan kembali Taiwan mengalami kegagalan, ditambah dengan Taiwan yang secara terang-terangan ingin mendeklarasikan kemerdekaannya, membuat Xi Jinping harus bisa memanfaatkan segala sektor dan kekuatan yang dimiliki oleh Tiongkok. Xi menyadari bahwa pendekatannya dan pemimpinnya sebelumnya masih terlalu berfokus terhadap pemerintahan Taiwan, sehingga ia mencoba untuk mempengaruhi masyarakat Taiwan dengan memanfaatkan dunia siber untuk menyebarkan propagandanya dalam mendekati masyarakat Taiwan.

Tiongkok benar-benar melancarkan agendanya tersebut dalam memanfaatkan dunia siber sebagai upaya reunifikasi dengan melakukan komputasional propaganda. Hal ini salah satunya dapat dilihat dari terlibatnya komponen propaganda komputasional dalam pemilihan yang terjadi di Taiwan dan juga penyebaran pesan dan berita palsu terhadap masyarakat Taiwan. Bercermin dari hubungan erat Tiongkok dan

Taiwan ketika Hu Jintao dari partai Kuomintang menjadi presiden, Tiongkok berusaha agar calon kandidat di Taiwan merupakan anggota Partai Kuomintang.

Pada bab ini, peneliti berusaha untuk melakukan analisis bagaimana peran Tiongkok dalam melakukan komputasional propaganda terhadap Taiwan dalam upaya reunifikasinya dari tahun 2016 hingga tahun 2020 dengan menggunakan teori Samuel C. Wolley yang berusaha mengidentifikasi komputasional propaganda sebagai upaya dalam penyebaran propaganda untuk mempengaruhi masyarakat melalui tiga komponen yakni platform media sosial, *Autonomous Agents*, dan *Big Data*

3.1 Platform Media Sosial sebagai Media Propaganda Komputasi Tiongkok dan Taiwan

Dalam pemaparan teori komputasional propaganda oleh Samuel C. Woolley dan Philip N. Howard, mereka menyebutkan bahwa agar komputasional propaganda dapat terjadi, maka dibutuhkannya sebuah platform untuk menjadi tempat penyebaran propaganda secara digital kepada target propaganda tersebut. Platform media sosial di Taiwan merupakan ruang terbuka yang sangat mudah dijadikan tempat propaganda Tiongkok dilakukan. Ini dikarenakan penggunaan internet dan akses media sosial sangat tinggi di antara masyarakat Taiwan, dengan Facebook sebagai yang tertinggi. Tak hanya itu, kondisi tersebut juga didukung karena sempitnya tindakan lanjut bagi pemerintah Taiwan karena dibatasi oleh undang-undangnya yang melindungi kebebasan berbicara, termasuk dalam dunia siber. Penerapan pemberian upah kepada wartawan ataupun jurnalis berdasarkan banyak berita atau informasi yang diberikan menjadi salah satu masalah, karena akurasi dan kebenaran berita bukan suatu nilai

utama dalam penerbitan berita. Hal ini kemudian mengundang ruang tersebut menjadi ruang yang sangat mudah untuk berbagai macam informasi masuk, termasuk informasi palsu. Platform yang cukup mudah untuk diakses dan mudah untuk berbagi pesan maupun informasi, tanpa penyaringan yang terlalu ketat, menjadikannya sebagai platform yang mudah untuk dijadikan ruang dalam melancarkan propaganda komputasional seperti Facebook dan Weibo.

Facebook merupakan platform media sosial gratis dan sangat mudah untuk digunakan. Facebook memberikan kebebasan dan keleluasaan bagi penggunanya dalam mengunggah informasi atau pesan yang ingin dibagikan kepada sesama pengguna. Salah satu fitur Facebook ialah saling terhubungnya antar satu pengguna dengan pengguna lain, dan hal ini juga disediakan tempat berdiskusi seperti adanya grup bagi sesama pengguna (Hall 2023). Kemudahan dan kelebihan yang ditawarkan ini justru dijadikan bagi beberapa aktor sebagai ruang platform politik mereka, Tiongkok melihat Facebook sebagai ruang yang ideal untuk menyebarkan propaganda mereka dan mempertahankan pengaruh mereka terhadap negara lain, terutama Taiwan.

Tak hanya itu, Tiongkok sendiri memiliki sebuah platform media sosial domestik yang mereka buat dan kelola sendiri hingga diperkenalkan pada tahun 2007 lalu, yaitu Weibo. Sejak pengenalannya, Weibo terus mendapatkan mengalami penambahan pada pengguna, bahkan pada awal tahun 2013, penggunanya mencapai sekitar 309 juta pengguna (Harwit 2014). Weibo, platform China, memainkan peran unik di ruang media sosial Taiwan, mengingat asal negaranya. Dengan pengawasannya atas platform tersebut, pemerintah China terang-terangan mendominasi narasi yang berkaitan dengan Taiwan. Ini juga populer di antara sejumlah kecil Taiwan pengguna

internet, sehingga mengekspos mereka ke kontrol naratif Partai Komunis Tiongkok. (Atlantic Council 2020)

Kemudahan akses ini kemudian mengarah kepada penerapan komputasional propaganda, dimana hal ini dapat dilihat ketika masa pemilihan dan naiknya Tsai Ing Wen menjadi presiden di Taiwan pada tahun 2016 lalu. Pada awal kenaikan Tsai Ing Wen di tahun 2016, halaman Facebook pribadi Tsai Ing Wen diserang oleh ribuan akun Facebook yang diduga sebagai *troll* dari Tiongkok dengan puluhan ribu komentar pro-Tiongkok. Terhitung dalam waktu tiga hari, unggahan terbaru Tsai Ing Wen telah mendapatkan lebih dari 35.000 komentar dengan isinya yaitu pesan Pro-Tiongkok dan Anti-Taiwan seperti contohnya pesan yang berisikan bahwa Taiwan adalah bagian dari Tiongkok untuk memberikan sugesti sosial mengenai status Taiwan terhadap Tiongkok (M. Huang 2016). Unggahan Tsai Ing Wen lainnya juga diserang oleh akun-akun Facebook tersebut dengan pesan-pesan yang berisikan slogan-slogan Partai Komunis Tiongkok yang memiliki arti Cinta untuk Tanah Kebesaran, yaitu Tiongkok. Pengamat mengatakan bahwa komentar-komentar tersebut merupakan bagian dari kampanye terorganisir dari Tiongkok, meskipun belum jelas siapa (BBCNews 2016).

Tak sampai disitu, pada tahun 2017, akun-akun facebook yang diduga berasal dari Tiongkok berhasil melewati *Great Firewall*, sebuah mekanisme sensor dari Beijing yang cukup rumit, untuk dapat mengakses Facebook. Hal ini merupakan dampak dari seseorang bernama Wei Ming-jen yang berada di Taiwan mengunggah sebuah foto bendera Tiongkok di kuil yang ia beli pada hari deklarasi Taiwan di Facebook (Z. Huang 2017). Akun-akun *troll* Facebook dari Beijing ini kemudian beraksi dengan mengisi halaman akun pribadi Tsai Ing Wen, Tentara Taiwan, dan

Apple Daily serta Sanlih News dengan lirik lagu kebangsaan Tiongkok dan gambar pro-Tiongkok lainnya (Z. Huang 2017). Tindakannya tersebut merupakan bentuk protes terhadap pemerintahan Tsai Ing Wen yang menginginkan kemerdekaan Taiwan.



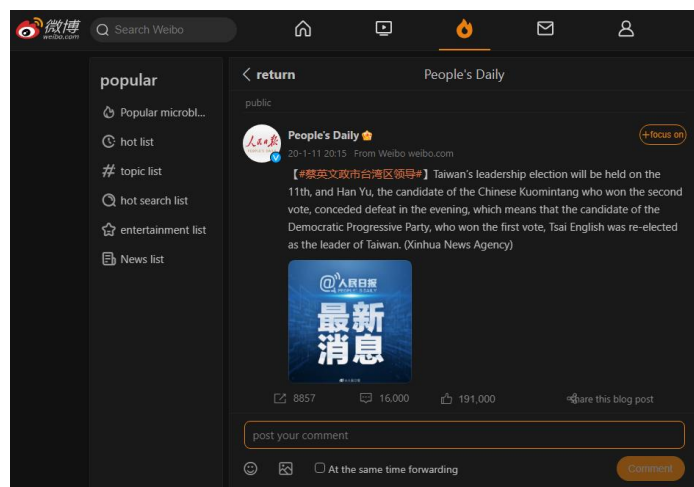
Gambar 3.1 Bendera Nasional Tiongkok yang dikibarkan oleh Wei

Hal serupa yang terjadi pada tahun 2016, kemudian terjadi pada tahun 2018, dimana ketika akan diadakannya pemilihan lokal terakhir, Tiongkok diduga menyebarkan konten dan pesan dengan tujuan untuk mempromosikan kandidat pro-Tiongkok yaitu Han Kuo-yu, anggota partai Kuomintang untuk memimpin Kaohsiung, kota terbesar kedua Taiwan (Chang, Haider and Ferrara 2021). Tak disangka, Han Kuo-yu akhirnya menang dalam pemilihan tersebut. Hal ini mengejutkan, mengingat wilayah tersebut selama 20 tahun telah dipimpin oleh partai Demokratik Progresif (Sando 2022).

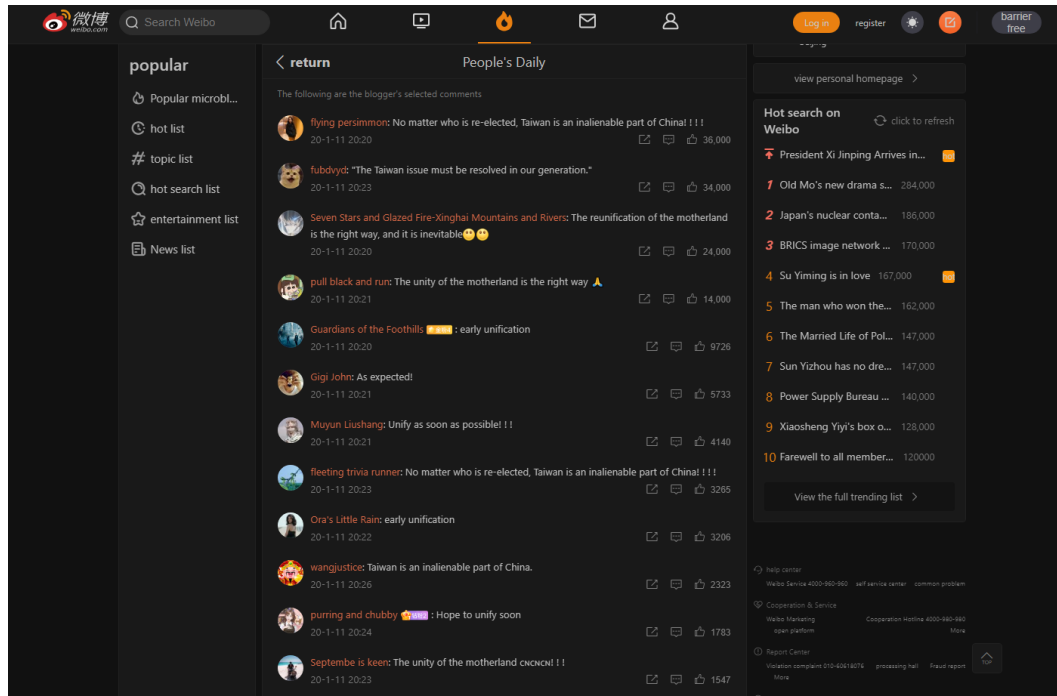
Setelah ditelusuri, kemenangannya tersebut merupakan hasil dari adanya akun-akun facebook yang saling berkoordinasi pada grup facebook tidak resmi bernama – dalam tulisan bahasa Tiongkok – “Penggemar Kemenangan Han Kuo-yu ! Memegang Langit Biru!” dengan anggota sebanyak 61.000 (Hioe 2018). Kelompok ini juga mendukung Han dengan mempromosikan Han dengan mengadakan diskusi daring, dan lebih banyak berita palsu terhadap lawan kandidat Han, berita buruk tentang pemerintahan Partai Demokratik Progresif. Tak hanya itu, akun-akun ini menyebarkan rumor buruk tentang Chen Chi-Mai, yang dikatakan bukanlah keturunan orang China (Hioe 2018). Meskipun tidak diketahui pasti siapa yang berada dibelakang dukungan tersebut, namun dipercaya bahwa dukungan itu datang dari salah satu institusi propaganda yang ada di Tiongkok (S. Hsiao 2019). Kemenangan Han Kuo-Yu ini kemudian mendorongnya untuk maju menjadi kandidat presiden Taiwan, sekaligus sebagai lawan Tsai Ing Wen pada tahun 2020 lalu. Naiknya Han Kuo Yu menjadi angin segar bagi Tiongkok untuk mendapatkan presiden dari Partai Kuomintang untuk

Taiwan. Harapannya ialah Tiongkok dapat kembali mengikat kerjasama yang baik seperti masa kepemimpinan Ma Ying Jeo dahulu.

Meskipun Weibo kurang populer di Taiwan, namun propaganda oleh Tiongkok tetap diimplementasikan, mengingat Weibo merupakan media sosial domestik di Tiongkok dan Weibo juga cukup banyak digunakan oleh politikus, media massa, dan masyarakat publik Taiwan. Pada tahun 2020 saat kembali naiknya Tsai Ing Wen, banyak masyarakat Tiongkok termasuk para *troll* yang dimanfaatkan oleh Tiongkok, mengisi komentar pada salah satu konten di kolom komentar Weibo dengan isi pesan dukungan terhadap “satu china”. Banyak diantara mereka yang menyampaikan keinginannya agar reunifikasi dapat terjadi. Tak hanya itu, banyak juga yang mengejek serta mendiskreditkan Tsai Ing Wen pada kolom komentar tersebut. Terutama lagi narasi yang disampaikan ialah banyaknya masyarakat Taiwan yang menginginkan terjadi reunifikasi dan menyebut Tsai Ing Wen kurang populer (Dubravčiková 2020).



Gambar 3.2 Konten Kembali Naiknya Tsai Ing Wen pada Akun *People's Daily* di Weibo (Weibo 2011).



Gambar 3.3 Komentar *troll* pada konten yang dibuat oleh akun *People's Daily* di Weibo (Weibo 2011).

3.2 *Autonomoust Agents* sebagai Aktor Penyebar Propaganda Komputasional Tiongkok

Komponen kedua dalam propaganda komputasional ialah *Autonomoust Agents*. Seperti yang telah disebutkan pada penjelasan diatas, *Autonomoust Agents* terdiri atas *troll* dan bot politik. *Troll* merupakan aktor organik atau manusia yang menjadi aktor untuk menciptakan konten dan terlibat dalam penyebaran konten atau pesan propaganda secara digital di dunia siber, sedangkan bot politik ialah bot yang terotomatisasi bertujuan dalam menyebarkan konten dan pesan propaganda komputasional secara luas (Woolley and Howard 2016).

Salah satu *Autonomous Agents* yang cukup terkenal ialah di Tiongkok ialah Partai 50 Cent. Nama ini diberikan kepada kelompok *troll* sekaligus pembuat *bot* yang dipekerjakan oleh pemerintah Tiongkok dari Partai Komunis Tiongkok untuk mengunggah komentar atau pesan terkait kebijakan partai dan membentuk opini publik pada forum atau pun grup di internet (Weiwei 2012).

50 Cent merupakan kumpulan atau pasukan *troll* propaganda internet yang menyebarkan propaganda secara online yang berisikan pesan-pesan pro-Tiongkok lewat ruang obrolan atau forum online (King, Pan and Roberts 2017). Asal mula nama 50 Cent diambil dari upah yang mereka dapat per postingan yang mereka unggah dan anggota dari pasukan 50 Cent ini merupakan para pekerja yang direkrut langsung dari pemerintah Tiongkok. Saat ini anggota dari pasukan 50 Cent diperkirakan ada di kisaran 500.000-2.000.000 anggota (Lau 2016), serta diduga telah melibatkan bot politik dalam upayanya menyebarkan propaganda Tiongkok. Sulit untuk mengetahui dengan tepat siapa yang dibayar untuk berkomentar oleh pemerintah Tiongkok dan siapa yang tidak. Menurut David Bandurski yang merupakan editor China Media Project, pasukan 50 Cent telah beberapa kali melancarkan aksinya yakni ketika Beijing sedang berjuang melawan kerusuhan yang terjadi di Tibet, terpilihnya Presiden Tsai Ing-Wen, aksi protes yang terjadi menjelang olimpiade musim panas yang diadakan di Beijing dan reunifikasi Tiongkok-Taiwan (Lau 2016).

50Cents diduga bekerja untuk portal media pemerintah, seperti xinhuanet.com dan Southcn.com, atau paruh waktu untuk berbagai lembaga pemerintah serta akan menyembunyikan identitas atau afiliasi mereka dengan negara. Mereka yang

dikerahkan secara anonim untuk memanipulasi opini online melalui astroturfing secara kualitatif berbeda. 50Cents bersifat anonim ketika terlibat dalam diskusi online karena mereka menyembunyikan identitas dan afiliasi mereka serta berpura-pura menjadi netizen biasa. 50Cent akan menerima tugas dan instruksi mereka melalui panggilan telepon atau email, atau secara langsung, namun, lembaga negara yang mensponsori komentator internet akan lebih memanfaatkan platform online seperti grup Facebook untuk mengelola 50Cent mereka. Tugas mereka mencakup mengumpulkan, menganalisis dan melaporkan opini online, memandu opini publik dengan terlibat dalam diskusi mengenai topik-topik hangat, melacak penanganan isu-isu publik dan berkoordinasi dengan lembaga pemerintah untuk memberikan tanggapan yang tepat waktu kepada netizen (R. Han 2015).

50Cent sendiri telah menyerang beberapa platform media sosial seperti Facebook dan Weibo. Dengan memenuhi jaringan komentar, unggahan, serta memperbanyak akun mereka untuk menimbun atau bahkan menghilangkan sebuah informasi maupun pesan yang tersebar.

Tak hanya 50cents, diduga masih banyak lagi kelompok *troll* yang secara bebas berkenan untuk mendukung Tiongkok dalam upayanya mencapai reunifikasi. *Troll* tersebut berasal dari forum yang bernama Diba dan cukup populer pada tahun 2016 karena aksinya dalam mengorganisir penyebaran pesan pada akun pribadi Tsai Ing Wen dan politikus Taiwan lainnya. Pada tahun 2016, forum online Tiongkok bernama Diba, salah satu forum yang dibawah oleh Baidu Tieba dengan anggota *troll* yang cukup banyak. Baidu Tieba sendiri merupakan forum online resmi Tiongkok. Para *troll*

dari Diba yang sempat terlibat dalam aksi kampanye “Ekspedisi Diba”. Para troll tersebut berjumlah kurang lebih 1500 orang dengan akun mereka (Z. Huang 2017),, dimana para *troll* serta meibatkan bot untuk mengisi kolom komentar pada unggahan Tsai Ing Wen di akun Facebook pribadinya dengan narasi pro Tiongkok (Yang, et al. 2017). Saat kampanye tersebut dilakukan, terdapat 447 komentar berisikan pesan mengenai kerinduan terhadap wilayah daratan Tiongkok, 276 komentar berisikan lirik lagu kebangsaan Tiongkok, serta 245 komentar slogan memuji wilayah daratan Tiongkok (G. Yang 2019). Unggahan Tsa Ing Wen pun berisi kurang lebih 50.000 jumlah komentar dan balasan. Sebuah angka cukup yang besar, dan uniknya lagi ialah, *troll-troll* ini berani untuk melewati *firewall* yang dimiliki Tiongkok karena saat itu Facebook di blok aksesnya di Tiongkok.



Gambar 3.4 Unggahan Target ‘Ekspedisi Diba’ (G. Yang 2019)

3.3 Big Data Taiwan Sebagai Algoritma Penyebaran Propaganda Komputasi Tiongkok

Dikarenakan pengguna platform media sosial yang cukup tinggi, maka perlu adanya pengelompokan dan kategori terhadap pengguna-pengguna media sosial tersebut, seperti halnya pada Facebook. Secara umum, Facebook merupakan situs media sosial yang dapat mengunggah atau membagikan gambar, informasi pribadi, dan dapat bergabung kedalam sebuah grup pertemanan dan bertemu pengguna-pengguna lainnya dengan mudah. Facebook merupakan salah satu situs *website* yang sangat populer karena kemudahannya dalam akses maupun penggunaan, salah satunya dengan adanya algoritma Facebook yang memungkinkan penggunanya untuk mendapatkan penyajian konten yang akan dinikmati oleh pengguna. Situs ini sangat memungkinkan untuk terbentuknya berbagai macam hubungan sosial, dan dalam hubungan sosial ini, opini merupakan dampak luar biasa bagi sesama pengguna karena pada dasarnya, manusia akan cenderung mempercayai opini dengan mereka yang memiliki hubungan sosial (Liao, Hsian and Wu 2014).

Namun, hal ini kemudian dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu bahkan negara, seperti pada Tiongkok. Propaganda komputasional yang dilakukan Tiongkok tidak terlepas dari adanya kumpulan data pada media sosial. Salah satu cara dalam mendapatkan data-data tersebut yaitu dengan melakukan *data mining* atau “penggalian data”. *Data mining* merupakan proses menemukan dan mengumpulkan pengetahuan signifikan seperti pola, asosiasi, perubahan, anomali, dan struktur signifikan dari sejumlah besar data yang disimpan dalam *database*, gudang data, atau tempat

penyimpanan informasi lainnya. Kumpulan data ini kemudian akan digunakan sebagai informasi bagi mereka yang dapat mengaksesnya, tak terkecuali oleh Tiongkok (Han, Kamber and Pei 2011). Seperti contoh salah satu aplikasi yang dimiliki Tiongkok dengan nama “*Study the Great Nation*”. Aplikasi ini diduga memungkinkan Partai Komunis Tiongkok memiliki akses “*super user*” ke seluruh data di lebih dari 100 juta (Fifield 2019) ponsel berbasis Android melalui pintu belakang dalam aplikasi propaganda tersebut.

Tiongkok sendiri juga memiliki sebuah layanan jaringan pemerintahan yang dikenal sebagai “*public opinion analysis software*”. Jaringan perangkat lunak ini menargetkan pengguna Internet dan media domestik Tiongkok, dan diduga terdapat lebih dari 300 proyek (Cadell 2021) pemerintah Tiongkok sejak awal tahun 2020 mencakup permintaan atas jaringan perangkat lunak ini yang dirancang untuk mengumpulkan data Facebook dan media sosial barat lainnya. Hal ini termasuk program perangkat lunak media pemerintah Tiongkok senilai \$320.000 (Cadell 2021). yang memanfaatkan Facebook untuk membuat database jurnalis dan akademisi asing; program intelijen polisi Beijing senilai \$216,000 (Cadell 2021). yang menganalisis obrolan Barat tentang Hong Kong dan Taiwan. Dokumen-dokumen tersebut, dapat diakses publik melalui platform pemerintah dalam negeri, juga menunjukkan bahwa lembaga-lembaga termasuk media pemerintah, departemen propaganda, polisi, militer, dan regulator dunia maya membeli sistem tersebut, bahkan yang lebih canggih untuk mengumpulkan data (Cadell 2021).

Facebook dan Weiboo yang memungkinkan Tiongkok untuk dapat mengakses data-data penggunanya, salah satunya karena media sosial ini mengharuskan penggunanya mengisi data cukup rinci (Young and McGregor 2020). Tak hanya itu, Tiongkok diduga memiliki akses atas data-data pengguna Facebook, tak hanya di wilayah domestiknya tapi juga Taiwan. Hal ini diperkuat karena adanya perjanjian antara Facebook dan empat perusahaan besar Tiongkok, dan salah satunya ialah Huawei, salah satu produsen ponsel pintar terbesar di dunia, dan merupakan kebanggaan nasional bagi Tiongkok serta berada di garda depan upaya negara tersebut untuk memperluas pengaruhnya di luar negeri (LaForgia and Dance 2018). Perjanjian yang dibuat ini memungkinkan pemberian akses kepada pengguna data untuk Huawei. Meskipun adanya pengakuan Facebook bahwa data-data yang diperoleh tidak akan tersimpan pada server Huawei dan perusahaan Tiongkok lainnya, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa data tersebut dapat dengan mudah untuk diakses dan digunakan dalam melancarkan agenda propaganda Tiongkok terhadap Taiwan.

Data-data ini menjadi sumber untuk Tiongkok dalam menentukan dan mengkategorikan pengguna Facebook dan Weibo di Taiwan, termasuk dengan *autonomoust agents* yang akan memainkan peran dalam menyebarkan pesan ataupun informasi pada masyarakat public Taiwan. Pendaftaran pembuatan akun yang salah satunya melibatkan lokasi asal pengguna memudahkan Tiongkok untuk menentukan dan mengkategorikan pengguna akun di Taiwan secara spesifik, sehingga propaganda komputasional yang mereka lakukan dapat efektif. Seperti yang terjadi pada proses pemilihan di wilayah Kaohsiung yang dimenangkan oleh Han Kuo Yu (Horton 2019).

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Konflik antara Tiongkok dan Taiwan merupakan salah satu dari banyaknya konflik yang terjadi di dunia internasional, bahkan hingga saat ini. Wilayah daratan China yang saat itu menjadi tempat perebutan antara dua belah pihak, yaitu Partai Komunis Tiongkok dan Partai Kuomintang untuk memperebutkan kekuasaan serta pengaruh terbesar di wilayah daratan Tiongkok. Meskipun konflik antar keduanya cukup intens, kerjasama terkadang terikat antara kedua belah pihak ini ketika adanya pihak luar yang mencoba untuk menguasai wilayah China, seperti saat Jepang yang ingin melakukan penjajahan dan pengklaiman atas wilayah China. Namun kerjasama ini tidak lama dan akhirnya melahirkan sebuah konflik perang saudara yang menjatuhkan banyak korban dalam prosesnya. Konflik ini kemudian diakhiri dengan kekalahan Partai Kuomintang, bahkan hingga melarikan diri bersama dengan pemimpinnya di wilayah Pulau Formosa. Wilayah daratan China kemudian dipimpin oleh Partai Komunis Tiongkok dan Pulau Formosa di tempati oleh Partai Kuomintang yang perlahan menjadikan Pulau Formosa sebagai Taiwan yang dikenal hingga saat ini.

Terlepasnya Pulau Formosa dari Tiongkok menjadikannya sebagai agenda utama bagi pemimpin Tiongkok untuk merebut kembali pulau Formosa, mengingat Taiwan saat itu akan membentuk kerjasama dengan Amerika Serikat sehingga dinilai

dapat mengganggu keamanan wilayah kedaulatannya. Segala upaya telah dilakukan, hingga bahkan pengajuan gagasan “Dua Sistem dan Satu Negara” oleh Deng Xiaoping, Hu Jintao hingga Xi Jinping. Hubungan antara Tiongkok dan Taiwan sempat membaik, mengingat kerjasama yang dibuat oleh Hu Jintao dengan Xi Jinping memberikan dampak baik kepada Taiwan.

Namun, kondisi ini tidak lama bertahan, ini dikarenakan pada tahun 2016, Tsai Ing Wen, seorang anggota Partai Progresif Demokrat naik jabatan menjadi presiden Taiwan dan cukup berani dalam upayanya secara terang-terang menyatakan keinginan Taiwan untuk mendapatkan kemerdekaannya dan terlepas dari pengaruh Tiongkok. Kondisi ini memanasakan Tiongkok, termasuk Xi Jinping sehingga tindakan-tindakan dalam upaya untuk menghalangi kemerdekaan Taiwan dilakukan secara tegas dan nyata hingga bahkan menjadi tindakan peringatan.

Xi Jinping dan Tiongkok kemudian menyadari bahwa pendekatan tersebut hanya akan menjauhkan Tiongkok dari Taiwan, sehingga pendekatan yang dilakukan terbilang lebih halus dan persuasive. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan dunia siber, salah satunya yaitu media sosial. Tiongkok memanfaatkan dunia siber untuk menyebarkan propaganda komputasionalnya dengan harapan dapat mempengaruhi masyarakat Taiwan untuk menyetujui terjadinya reunifikasi antara Tiongkok dan Taiwan.

Salah satu media sosial yang dijadikan sebagai ruang tersebut ialah Facebook dan Weibo mengingat kedua platform sosial media ini merupakan yang sering digunakan serta memiliki persentase jumlah pengguna tinggi di Taiwan dan Weibo uga adalah media sosial domestik milik Tiongkok. Platform-platform ini kemudian

digunakan sebagai media oleh *Autonomoust Agents* seperti 50Cent yang merupakan *troll* serta menyediakan *bot* untuk melancarkan tugasnya dalam menyebarkan pesan maupun informasi terhadap akun target yang dihadapi. *Autonomous Agents* seperti 50Cents ini kemudian dilengkapi dengan *big data* pengguna yang didapatkan melalui perangkat lunak serta hasil kerjasama dengan Facebook terhadap data yang ada di Taiwan untuk dapat dengan mudah mengklasifikasikan serta mengelompokkan agar propaganda komputasional yang dilakukan berjalan dengan efektif serta hasil yang diharapkan terjadi.

Namun, Propaganda Komputasional yang dilakukan oleh Tiongkok dari tahun 2016 hingga tahun 2020 memberikan beberapa dampak atas pergejolakan politik Tiongkok, yang meskipun tidak bisa menghalangi kenaikan Tsai Ing Wen pada tahun 2016 dan tahun 2020, tapi terbukti efektif ketika pemilihan Han Kuo-yu yang maju menjadi pemimpin di wilayah Kaohsiung. Propaganda komputasional oleh Tiongkok terhadap Taiwan menarget pemindahan kekuasaan politik antara Partai Kuomintang dan Partai Demokratik Progresif, yang dimana Partai Kuomintang lebih persuasif dibanding Partai Demokratik Progresif.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan proses penelitian yang menghadapkan penulis pada beberapa kesulitan dalam mengerjakan penelitian ini, maka penulis ingin memberikan rekomendasi terkait penelitian lanjutan atas isu Tiongkok dan Taiwan, terutama pada sektor teknologi informasi dan media sosial. Salah satunya yaitu pemahaman terhadap bahasa Tiongkok secara tertulis maupun lisan, kemudian memiliki akses terhadap media sosial, seperti Weibo yang mana jika ingin ditelusuri lebih dalam maka harus diakses menggunakan kartu nomor ponsel asli yang berasal dari Tiongkok.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Amar. 2012. "Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Informasi : Akar Revolusi dan Berbagai Standarnya." *Jurnal Dakwah Tabligh, Vol. 13, No. 1* 137-149.
- Ahmadi, Mubarak. 2020. "Dampak Perkembangan New Media Pada Pola Komunikasi Masyarakat." *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam, Vol.4 No. 1* 26-37.
- Apriliana, Melodya. 2015. *Pertemuan Xi Jinping dan Ma Ying-jeou Bayangi Pemilu Taiwan.* 6 November. Accessed Agustus 2023, 13. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20151106110324-113-89840/pertemuan-xi-jinping-dan-ma-ying-jeou-bayangi-pemilu-taiwan>.
- Armandhanu, Denny. 2015. *Menengok Hubungan Taiwan-China: Musuh Tapi Mesra.* 15 November. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20151105135044-113-89679/menengok-hubungan-taiwan-china-musuh-tapi-mesra>.
- Atlantic Council. 2020. *Chinese Messaging Across The Straits : China-friendly Narratives and the 2020 Taiwan Presidential Election.* Washington: Atlantic Council.
- Atlantic Council. 2020. "Methodology of Chinese Strategies on Promoting Discourse Power." In *Chinese Discourse Power: China's Use of Information Manipulation in Regional and Global Competition*, by Atlantic Council, 15-23. Washington: Atlantic Council.
- Azzara, Halda Nuriyya. 2022. "A conflict between China and Taiwan: An analysis from a realism perspective." *Journal of Social Studies Vol. 18. No.02* 229-236.

- Bakry, Dr. Umar Suryadi. 2017. *Dasar-Dasar Hubungan Internasional*. Depok: KENCANA.
- BBC News Indonesia. 2016. *Tsai Ing-wen, presiden perempuan pertama Taiwan*. 20 Mei. Accessed Agustus 13, 2023. https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/05/160520_dunia_taiwan_pemimpin.
- BBC.com. 2018. *Rusia gunakan 'semua media sosial besar' untuk dukung Trump di pilpres AS*. 18 Desember. Accessed September 28, 2022. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-46600829>.
- . 2018. *Russia 'meddled in all big social media' around US election*. 17 Desember. Accessed September 27, 2022. <https://www.bbc.com/news/technology-46590890>.
- BBCNews. 2016. *Pro-China posts spam Taiwan President-elect Tsai's Facebook*. 21 Januari. Accessed Agustus 17, 2023. <https://www.bbc.com/news/world-asia-china-35368930>.
- . 2022. *What's behind China-Taiwan tensions?* 2 Agustus. Accessed Maret 28, 2023. <https://www.bbc.com/news/world-asia-34729538>.
- Bolsover, Gillian, and Philip Howard. 2023. "Chinese computational propaganda: automation, algorithms and the manipulation of information about Chinese politics on Twitter and Weibo." *Information, Communication & Society* Vol. 26 No. 4 1-18.

- Britannica, The Editors of encyclopaedia. 2023. *Democratic Progressive Party*. 1 Juni. Accessed Agustus 25, 2023. <https://www.britannica.com/topic/Democratic-Progressive-Party-political-party-Taiwan>.
- Cadell, Cate. 2021. *China harvests masses of data on Western targets, documents show*. 31 Desember. Accessed Agustus 25, 2023. https://www.washingtonpost.com/national-security/china-harvests-masses-of-data-on-western-targets-documents-show/2021/12/31/3981ce9c-538e-11ec-8927-c396fa861a71_story.html.
- Chang, Ho-Chun Herbert, Samar Haider, and Emilio Ferrara. 2021. "Digital Civic Participation and Misinformation during the 2020 Taiwanese." *Media and Communication*, 2021, Volume 9, Issue 1 144-157.
- Chen, Theodore Hsi-en. 1957. "Communist China and the Kuomintang." *Current History*, Vol. 33, No. 196 339-344.
- Chen, Yu-Jie, and Jerome A. Cohen. 2019. "China-Taiwan Relations Re-Examined: The "1992 Consensus" and Cross-Strait Agreements." *University of Pennsylvania Asian Law Review* Vol.14 1-40.
- Ching-yao, Yin. 1981. "The Bitter Struggle between the KMT and the CCP." *Asian Survey*, Vol. 21, No. 6 622-631.
- Chiu, Hungdah. 1983. "Prospects for the Unification of China: An Analysis of the Views of the Republic of China on Taiwan." *Asian Survey*, Vol. 23, No. 10 1081-1094.

- Clover, Charles, and Edward White. 2018. *China's navy to conduct live-fire drills in Taiwan Strait*. 13 April. Accessed September 25, 2022. <https://www.ft.com/content/49e1bee2-3eb0-11e8-b7e0-52972418fec4>.
- CNN Indonesia. 2021. *Dokumen Intelijen Rusia untuk Jadikan Trump Presiden AS Bocor*. 16 July. Accessed Oktober 10, 2022. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210716100442-134-668506/dokumen-intelijen-rusia-untuk-jadikan-trump-presiden-as-bocor>.
- CNNIC. 2008. *CNNIC Introduction*. 20 Desember. Accessed Agustus 18, 2023. https://www.cnnic.com.cn/AU/Introduction/Introduction/201208/t20120815_33295.htm.
- D'alessio, Federico. 2021. "Computational Propaganda: Challenges and Responses." 5-5.
- Dewi, Inneke Firsana, and Karina Utami Dewi. 2019. "Strategi Pemerintahan Xi Jinping." *Jurnal Hubungan Internasional Vol. 7, No. 2* 161-168.
- Ding, Yijiang. 2012. "Cross-Strait Peace Agreement: Diminishing Likelihood." *Asian Affairs: An American Review* 1-20.
- Diresta, Renee, Carly Miller, Vanessa Molter, John Pomfret, and Glenn Tiffert. 2020. *Telling China's Story: The Chinese Communist Party's Campaign to Shape Global Narratives*. Stanford: Stanford Internet Observatory.
- Dubravčiková, Klára. 2020. *Chinese Media Watch: Netizens calling for taking Taiwan by force*. 27 Januari. Accessed Agustus 18, 2023. <https://ceias.eu/china-reacts-on-tsai-ing-wens-reelection-netizens-calling-for-taking-taiwan-by-force/>.

- Fifield, Anna. 2019. *Chinese app on Xi's ideology allows data access to users' phones, report says*. 19 Oktober. Accessed Agustus 25, 2023. https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/chinese-app-on-xis-ideology-allows-data-access-to-100-million-users-phones-report-says/2019/10/11/2d53bbae-eb4d-11e9-bafb-da248f8d5734_story.html.
- FitzGerald, C. P. 1966. "The Origin of the Chinese Revolution ." *Current History*, Vol. 51, No. 301 129-133.
- Goldstein, Steven M., and Randall Schriver. 2001. "An Uncertain Relationship: The United States, Taiwan and the Taiwan Relations Act." *The China Quarterly*, No. 165 147-172.
- Hall, Mark. 2023. *Facebook*. 14 Agustus. Accessed Agustus 18, 2023. <https://www.britannica.com/topic/Facebook>.
- Han, Jiawei, Micheline Kamber, and Jian Pei. 2011. *Data Mining : Concepts and Techniques, Third Editions*. Waltham: Morgan Kaufmann Publishers.
- Harwit, Eric. 2014. "The Rise and Influence of Weibo (Microblogs) in China." *Asian Survey*, Vol. 54, No. 6 1059-1087.
- Hioe, Brian. 2018. *Is Chinese Election Interference Behind The Han Kuo-Yu Phenomenon?* 13 November. Accessed Agustus 22, 2023. <https://newbloommag.net/2018/11/13/han-phenomenon-china/>.
- Ho, Ming-Sho, and Chun-Hao Huang. 2017. "Movement Parties in Taiwan, 1987–2016: A Political Opportunity Explanation." *Asian Survey*, Vol. 57, No. 2 343-367.

- Hood, Steven J. 1996. "Political Change in Taiwan: The Rise of Kuomintang Factions." *Asian Survey*, Vol. 36, No. 5 468-482.
- Horton, Chris. 2019. *The Taiwanese Populist Advancing China's Interests* . 16 April. Accessed August 25, 2023. <https://www.theatlantic.com/international/archive/2019/04/taiwanese-populist-han-kuo-yu-china/587146/>.
- Hsiao, Frank S. T., and Lawrence R. Sullivan. 1980. "The Politics of Reunification: Beijing's Initiative on Taiwan." *Asian Survey*, Vol. 20, No. 8 789-802.
- Hsiao, Russell. 2018. "CCP Propaganda against Taiwan Enters the Social Age." *China Brief Volume: 18 Issue: 7* 1-19.
- Hsiao, Sherry. 2019. *China helped Han win election: report*. 28 Juni. Accessed August 18, 2023. <https://www.taipeitimes.com/News/front/archives/2019/06/28/2003717723>.
- Huang, Jing. 2017. "Xi Jinping's Taiwan Policy: Boxing Taiwan In with the One-China Framework." In *Taiwan and China: Fitful Embrace*, by Lowell Dittmer, 239-248. California: University of California Press.
- Huang, Marco. 2016. *Chinese Netizens Flood Tsai Ing-Wen's Facebook Page With Anti-Taiwan Independence Posts*. 01 Januari. Accessed August 17, 2023. <https://www.wsj.com/articles/BL-CJB-28552>.
- Huang, Zheping. 2017. *Chinese trolls jumped the firewall to attack Taiwan's president and military on Facebook*. 3 Januari. Accessed August 17, 2023. <https://qz.com/876614/chinese-trolls-jumped-the-firewall-to-attack-taiwans-military-and-president-tsai-ing-wen-on-facebook>.

- . 2017. *Chinese trolls jumped the firewall to attack Taiwan's president and military on Facebook*. 3 Januari. Accessed Agustus 17, 2023. <https://qz.com/876614/chinese-trolls-jumped-the-firewall-to-attack-taiwans-military-and-president-tsai-ing-wen-on-facebook>.
- IDN Times. 2021. *Profil Tsai Ing-wen, Presiden Taiwan yang Berani Lawan Tiongkok*. 21 maret. Accessed Januari 23, 2023. <https://www.idntimes.com/news/world/vanny-rahman/profil-tsai-ing-wen-presiden-taiwan-yang-berani-lawan-tiongkok?page=all>.
- Ismi, Annisa. 2022. *Cara Kerja Algoritma Facebook yang Perlu Kamu Ketahui*. 28 November. Accessed Agustus 18, 2023. <https://socialmediamarketer.id/facebook/cara-kerja-algoritma-facebook/#:~:text=Apa%20Itu%20Algoritma%20Facebook,-Banyaknya%20akun%20facebook&text=Penentuan%20ini%20ditentukan%20berdasarkan%20postingan,menerus%20muncul%2C%20begitu%20juga%20sebaliknya>.
- Kelsey, Todd. 2010. *Social Networking Spaces : From Facebook to Twitter and Everything In Between*. New York: APRESS.
- King, Gary, Jennifer Pan, and Margaret E. Roberts. 2017. "How the Chinese Government Fabricates Social Media Posts for Strategic Distraction, Not Engaged Argument." *American Political Science Review* (2017) 111, 3 484-501.
- LaForgia, Michael, and Gabriel J.X. Dance. 2018. *Facebook Gave Data Access to Chinese Firm Flagged by U.S. Intelligence*. 5 Juni. Accessed Agustus 25, 2023.

<https://www.nytimes.com/2018/06/05/technology/facebook-device-partnerships-china.html>.

Lau, Joyce. 2016. *Who Are the Chinese Trolls of the '50 Cent Army'?* 7 Oktober. Accessed Agustus 18, 2023. <https://www.voanews.com/a/who-is-that-chinese-troll/3540663.html>.

Liao, Shu-Hsien, Pei-Yuan Hsian, and Guo-Liang Wu. 2014. "Mining User Knowledge for Investigating the Facebook Business Model : The Case of Taiwan Users." *Applied Artificial Intelligence No.28 Vol. 7* 712-736.

Li-Schwartz, Cleo, Lili Pike, and Alex Leeds Matthews. 2022. *Three reasons why Taiwanese people are increasingly opposed to 'reunification' with China.* 2 September. Accessed Maret 28, 2023. <https://www.grid.news/story/global/2022/09/02/three-reasons-why-taiwanese-people-are-increasingly-opposed-to-reunification-with-china/>.

Lynch, Daniel. 2002. "Taiwan's Democratization and the Rise of Taiwanese Nationalism as Socialization to Global." *Pacific Affairs, Vol. 75, No. 4* 557-574.

Mark, Max. 1951. "Chinese Communism." *The Journal of Politics, Vol. 13, No. 2* 232-252.

Maulana, M Fahrezal, Kholis Roisah, and Peni Susetyorini. 2016. "Implikasi One China Policy terhadap Hubungan Luar Negeri Indonesia dan Taiwan dalam Perspektif Hukum Internasional." *Diponegoro Law Journal Volume 5, Nomor 3* 1-18.

- Meisner, Maurice. 1999. "China's Communist Revolution: A Half-Century Perspective." *Current History*, Vol. 98, No. 629, 243-248.
- Mitter, Rana, and Aaron William Moore. 2011. "China in World War II, 1937–1945: Experience, Memory, and Legacy." *Modern Asian Studies*, Vol. 45, No. 2 225-240.
- Monaco, Nicholas J. 2019. "Taiwan : Digital Democracy Meets Autocracy." In *Computational Propaganda : Political Parties Politicians, and Political Manipulation On Social Media*, by Samuel C. Woolley and Philip N. Howard, 104-127. New York: Oxford University Press.
- Mubah, A. Safril. 2014. "Kajian Historis atas Kompleksitas Isu Taiwan dalam Hubungan China dan Amerika Serikat." *Global & Strategis*, Th. 8, No. 2 321-337.
- Nadira, Fergi, and Budi Raharjo. 2019. *Cina Tetap Pertimbangkan Opsi Militer Atas Taiwan*. 2 Januari. <https://www.republika.co.id/berita/pkp17f415/cina-tetap-pertimbangkan-opsi-militer-atas-taiwan>.
- Naughton, Barry. 1993. "Deng Xiaoping: The Economist." *The China Quarterly*, No. 135, *Special Issue: Deng Xiaoping: An Assessment* 491-514.
2005. "Old wine in new bottles: China–Taiwan computer-based 'information warfare' and propaganda." *International Affairs* 81, Vol. 5 1061-1078.
- Palmer, Norman D. 1950. "Communist Revolution In China." *Current History*, Vol. 18, No. 103 144-147.

- Pertiwi, Dian, Aryana Fahira, and Vany Oktaviany. 2021. "Implikasi One China Policy Terhadap Kemerdekaan Taiwan." *Warta Governare: Jurnal Pemerintahan Vol.2 No.1* 256-266.
- Pertiwi, Dian, Aryana Fahira, and Vany Oktaviany. 2021. "Implikasi One China Policy Terhadap Kemerdekaan Taiwan." *Warta Governare: Jurnal Pemerintahan Vol.2 No.1 Januari-Juni 2021* 256-266.
- Rawnsley, Gary D. 2005. "Old Wine in New Bottles: China-Taiwan Computer-Based 'Information Warfare' and Propaganda." *International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944 -) Vol. 81, No. 5* 1061-1078.
- Reinl, James. 2018. *'Fake news' rattles Taiwan ahead of elections*. 23 November. Accessed August 17, 2023. <https://www.aljazeera.com/news/2018/11/23/fake-news-rattles-taiwan-ahead-of-elections>.
- Reuters Staff. 2015. *Welcome to Facebook, Taiwan poll candidate tells Chinese as posts flood in*. 11 November. Accessed August 17, 2023. <https://www.reuters.com/article/us-taiwan-china-facebook-idINKCN0T00ND20151111>.
- Rigger, Shelley. 2001. "The Democratic Progressive Party in 2000: Obstacles and Opportunities." *The China Quarterly, No. 168* 944-959.
- Saeri, M. 2012. "Teori Hubungan Internasional Sebuah Pendekatan Paradigmatik." *Jurnal Transnasional, Vol. 3, No. 2* 1-19.
- Sando, Ben. 2022. *Taiwan Local Elections Are Where China's Disinformation Strategies Begin*. 4 Oktober . Accessed August 18, 2023.

<https://www.cfr.org/blog/taiwan-local-elections-are-where-chinas-disinformation-strategies-begin>.

Shambaugh, David. 2007. "China's Propaganda System: Institutions, Processes and Efficacy." *The China Journal*, No. 57 25-58.

Shambaugh, David. 2007. "China's Propaganda System: Institutions, Processes and Efficacy." *The China Journal*, No. 57 25-58.

Shirley, James R. 1965. "Control of the Kuomintang After Sun Yat-sen's Death." *The Journal of Asian Studies*, Vol. 25, No. 1 69-82.

Sidik, Jafar M. 2022. *Antaranews.com*. 17 Agustus . Accessed Maret 18, 2023. <https://www.antaranews.com/berita/3064329/untuk-saat-ini-skenario-china-serang-taiwan-mungkin-hanya-fantasi?page=all>.

—. 2022. *Untuk saat ini skenario China serang Taiwan mungkin hanya fantasi*. 17 Agustus. Accessed September 29, 2022. <https://www.antaranews.com/berita/3064329/untuk-saat-ini-skenario-china-serang-taiwan-mungkin-hanya-fantasi?page=all>.

Sudibyo, Agus. 2021. *Tarung Digital : Propaganda Komputasional di Berbagai Negara*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Summers, Tim. 2019. *China's Hong Kong*. Mid Glamorgan: Agenda Publishin.

The Editors of Encyclopaedia Britannica. 2023. *Chinese Civil War*. 28 Maret. Accessed Agustus 13, 2023. <https://www.britannica.com/event/Chinese-Civil-War>.

Walker, Richard L. 1959. "Taiwan's Development as Free China." *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, Vol. 321 122-135.

- Weiwei, Ai. 2012. *China's Paid Trolls: Meet the 50-Cent Party*. 17 Oktober. Accessed August 18, 2023. <https://www.newstatesman.com/long-reads/2012/10/china%E2%80%99s-paid-trolls-meet-50-cent-party>.
- Wijaya, Deni Adi, Sumardi, and Sumarjono. 2015. "Konflik Perebutan Kekuasaan antara Kaum Nasionalis dan Komunis di Republik Tiongkok Tahun 1912-1949." *ARTIKE ILMIAH MAHASISWA*, 2015, *I (1): 1-13* 1-13.
- Wijaya, Deni Adi, Sumardi, and Sumarjono. 2015. "Konflik Perebutan Kekuasaan Antara Kaum Nasionalis dan Komunis di Republik Tiongkok Tahun 1912-1949." *Atikel Ilmiah Mahasiswa*, 2015, *Vol. 1 No. 1* 1-13.
- Wiratama, Daniel Tantra. 2017. "The Golden Age of China-Taiwan Relations: The Explanation and Its Future." *International Phenomenon Vol. 1 No. 1* 69-80.
- Woolley, Samuel C., and Philip N. Howard. 2019. *Computational Propaganda : Political Parties, Politicians, and Political Manipulation on Social Media*. New York: Oxford University Press.
- Woolley, Samuel C., and Philip N. Howard. 2016. "Political Communication, Computational Propaganda, and Autonomous Agents." *International Journal of Communication* 4882–4890.
- Yang, Guobin. 2019. "Performing cyber- nationalism : The case of Diba Expedition." In *From Cyber-Nationalism to Fandom Nationalism The Case of Diba Expedition in China*, by Hailong Liu, 1-11. New York: Routledge.
- Yang, Shengnan, Pei-Yeng Chen, Patrcik C. Shih, Jeffrey Bardzell, and Shaowen Bardzell. 2017. "Cross-Strait Frenemies: Chinese Netizens VPN in to Facebook

Taiwan.” *PACM on Human-Computer Interaction, Vol. 1, No. CSCW, Article 115* 1-19.

Yeni Wong, Ho-I Wu, and Kent Wang. 2016. *Tsai's Refusal to Affirm the 1992 Consensus Spells Trouble for Taiwan*. 26 Agustus. Accessed Agustus 25, 2023. <https://thediplomat.com/2016/08/tsais-refusal-to-affirm-the-1992-consensus-spells-trouble-for-taiwan/>.

Young, Dannagal G., and Shannon C. McGregor. 2020. *Mass Propaganda Used To Be Difficult, but Facebook Made It Easy*. 14 Februari. Accessed Agustus 18, 2023. <https://www.washingtonpost.com/outlook/2020/02/14/mass-propaganda-used-be-difficult-facebook-made-it-easy/>.

Yung-ching, Chiang. 1989. “The Kuomintang and Democratic Movements in Early Republican China.” *Chinese Studies in History Vol.23 No.1* 38-54.

Yu-Tzu, Chiu. 2013. *Google's largest Asian data center in Taiwan to boost cloud sector*. 12 Desember. Accessed Agustus 18, 2023. <https://www.zdnet.com/article/googles-largest-asian-data-center-in-taiwan-to-boost-cloud-sector/>.